

**PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN
(*FOOD SECURITY AND VULNERABILITY ATLAS-FSVA*)
KABUPATEN SEKADAU**



**DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN SEKADAU
TAHUN 2022**

SAMBUTAN

BUPATI SEKADAU

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas kuasa dan karunnia-Nya Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sekadau telah menyelesaikan penyusunan buku Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas - FSVA*) Kabupaten Sekadau Tahun 2022. Peta FSVA ini dibuat untuk menggambarkan kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Sekadau berdasarkan 3 (tiga) aspek ketahanan pangan yaitu (1) ketersediaan; (2) akses dan (3) pemanfaatan pangan sampai pada tingkat Desa.

Pangan adalah hal penting merupakan kebutuhan hak dasar manusia, mengingat sangat pentingnya masalah pangan mendorong setiap negara melakukan berbagai upaya dalam rangka berusaha mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan sehingga mampu dan dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan pangan sampai pada tingkat perseorangan, begitu pula dengan pemerintah daerah yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat.

Kabupaten Sekadau dalam program kerja pemerintahan saat ini juga melalui Program IP3K (Infrastruktur, Perkebunan, Pertanian dan Perikanan untuk Kesejahteraan Rakyat) sangat mengutamakan segala upaya untuk membangun dan mengembangkan program/kegiatan di bidang pangan demi mewujudkan ketahanan pangan dan kesejahteraan rakyat. Sesuai amanah Undang-Undang nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, bahwa Pemerintah bersama masyarakat bertanggung jawab untuk mewujudkan ketahanan pangan, tersedia cukup baik jumlah maupun mutu (aman, beragam dan bergizi seimbang) yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Tantangan terbesar bagi Kabupaten Sekadau dalam upaya mewujudkan ketersediaan pangan saat ini yaitu bertambahnya jumlah penduduk setiap tahunnya yang menyebabkan kebutuhan pangan juga bertambah. Dengan adanya Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan ini bisa menjadi panduan dalam memberikan referensi kebijakan serta arah pembangunan di daerah Kabupaten Sekadau dalam rangka mengatasi permasalahan kerentanan pangan dan untuk mewujudkan sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan.

Keberhasilan pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Sekadau beberapa tahun terakhir terindikasi dengan berkurangnya jumlah masyarakat

rawan pangan prioritas 1 (sangat rentan), prioritas 2 (rentan) dan prioritas 3 (cukup rentan) secara total. Meskipun demikian pembangunan sistem pembangunan ketahanan pangan daerah Kabupaten Sekadau masih sangat perlu ditingkatkan bukan hanya untuk ketahanan pangan daerah tetapi juga menjadi daerah mandiri pangan. Semua ini terwujud tidak hanya dari peran pemerintah tetapi juga memerlukan partisipasi dari masyarakat, sehingga kedepan saya berharap pemerintah dan masyarakat benar-benar dapat bekerjasama secara aktif dalam menciptakan ketahanan pangan Kabupaten Sekadau.

Sebagai penutup perkenankan juga saya sampaikan ucapan terima kasih kepada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sekadau dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan di Kabupaten Sekadau tahun 2022, mari bersama kita membangun ketahanan pangan di Kabupaten Sekadau, karena dengan ketahanan pangan kita akan dapat mencetak sumber daya manusia yang berkualitas sehingga mampu mewujudkan Kabupaten Sekadau yang Maju, Sejahtera dan Bermartabat.

Sekadau, Desember 2022
BUPATI SEKADAU

ARON, SH.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkah dan rahmatNya Buku peta ketahanan dan kerentana pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas - FSVA*) Kabupaten Sekadau Tahun 2022 ini dapat disusun dan diselesaikan. Buku Peta FSVA ini dibuat untuk menggambarkan kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Sekadau berdasarkan 3 (tiga) aspek ketahanan pangan yaitu ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan sampai pada tingkat Desa.

Keberhasilan pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Sekadau beberapa tahun terakhir terindikasi dengan berkurangnya jumlah masyarakat rawan pangan pada Tahun 2022 ini. Meskipun demikian pembangunan sistem pembangunan ketahanan pangan daerah Kabupaten Sekadau masih sangat perlu ditingkatkan bukan hanya untuk ketahanan pangan daerah tetapi juga menjadi daerah mandiri pangan. Semua ini terwujud tidak hanya dari peran pemerintah tetapi juga memerlukan partisipasi dari masyarakat, sehingga kedepan saya berharap pemerintah dan masyarakat benar-benar dapat bekerjasama secara aktif dalam menciptakan ketahanan pangan Kabupaten Sekadau.

Dengan tersusunnya buku Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan ini diharapkan bisa menjadi panduan dalam memberikan referensi kebijakan serta arah pembangunan di daerah Kabupaten Sekadau dalam rangka mengatasi permasalahan kerentanan pangan dan untuk mewujudkan sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi sehingga penyusunan buku peta ketahanan dan kerentanan pangan di Kabupaten Sekadau ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya, mari bersama kita membangun ketahanan pangan di Kabupaten Sekadau untuk menuju Kabupaten Sekadau yang tahan pangan, mandiri pangan dan semakin maju kedepannya.

Sekadau, Desember 2022
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN,
PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SEKADAU

Drs. SANDAE, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670509 199401 1 001

DAFTAR ISI

SAMBUTAN BUPATI

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Kerangka Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi
- 1.3. Metodologi

2 KETERSEDIAAN PANGAN

- 2.1. Lahan Pertanian
- 2.2. Produksi Pangan
- 2.3. Sarana dan Prasarana Ekonomi
- 2.4. Strategi Pemenuhan Ketersediaan Pangan

3 AKSES PANGAN

- 3.1. Tingkat Kesejahteraan Rumahtangga
- 3.2. Akses Penghubung
- 3.4. Strategi Peningkatan Akses Pangan

4 PEMANFAATAN PANGAN

- 4.1. Akses Air Bersih
- 4.2. Akses Tenaga Kesehatan
- 4.3. Strategi Pemenuhan Pangan

5 KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN KOMPOSIT

- 5.1. Kondisi Ketahanan Pangan
- 5.2. Faktor Penyebab Kerentanan Pangan

6 REKOMENDASI KEBIJAKAN

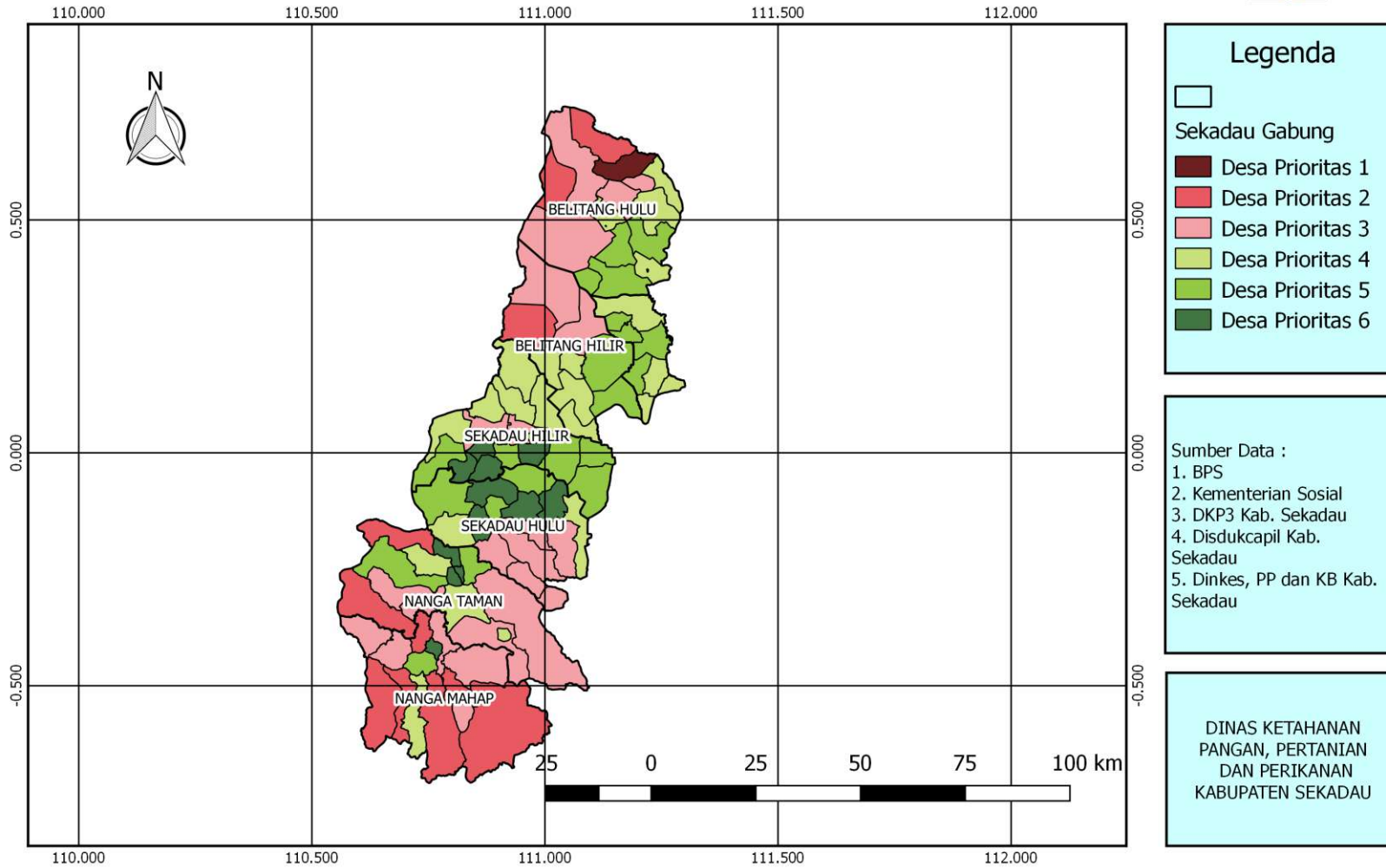
RINGKASAN EKSEKUTIF

1. Ketersediaan informasi ketahanan pangan yang akurat, komprehensif, dan tertata dengan baik sangat penting untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan kerawanan pangan dan gizi, karena dapat memberikan arah dan rekomendasi kepada pembuat keputusan dalam penyusunan program, kebijakan, serta pelaksanaan intervensi di tingkat pusat dan daerah. Penyediaan informasi diamanahkan dalam UU No 18/ 2012 tentang Pangan dan PP No 17/2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi yang mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi.
2. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA*) merupakan peta tematik yang menggambarkan visualisasi geografis dari hasil analisa data indikator kerentanan terhadap kerawanan pangan. Informasi dalam FSVA menjelaskan lokasi wilayah rentan terhadap kerawanan pangan dan indikator utama daerah tersebut rentan terhadap kerawanan pangan.
3. FSVA Kabupaten merupakan peta yang menggambarkan situasi ketahanan dan kerentanan pangan wilayah desa. Indikator yang digunakan dalam penyusunan FSVA merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Pemilihan indikator didasarkan pada: (i) keterwakilan 3 pilar ketahanan pangan (ii) tingkat sensitifitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi; dan (iii) ketersediaan data tersedia secara rutin untuk periode tertentu yang mencakup seluruh wilayah desa. Enam indikator digunakan dalam penyusunan FSVA Kabupaten.
4. Indikator pada aspek ketersediaan pangan adalah (1) Rasio luas lahan baku sawah terhadap jumlah penduduk total; (2) Rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga. Indikator pada akses pangan adalah (1) Rasio penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap total jumlah penduduk desa; (2) Desa dengan akses penghubung kurang memadai. Indikator pada aspek pemanfaatan pangan adalah: (1) Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga; (2) Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk.
5. Desa diklasifikasikan dalam 6 kelompok ketahanan pangan dan gizi berdasarkan pada tingkat keparahan dan penyebab dari situasi ketahanan pangan dan gizi. Desa/kelurahan di Prioritas 1, 2 dan 3 merupakan wilayah rentan pangan dengan klasifikasi Prioritas 1 tingkat rentan pangan tinggi, Prioritas 2 rentan pangan sedang, dan prioritas 3 rentan pangan rendah.

Desa/kelurahan di Prioritas 4, 5, dan 6 merupakan wilayah tahan pangan dengan klasifikasi prioritas 4 tahan pangan rendah, prioritas 5 tahan pangan sedang, sedangkan prioritas 6 yaitu tahan pangan tinggi.

6. Hasil analisis FSVA 2022 di Kabupaten Sekadau menunjukkan bahwa desa rentan pangan Prioritas 1-3 sebanyak 34 desa dari 87 desa (39,08%) yang terdiri dari 1 desa (1,15%) Prioritas 1; 11 desa (12,64%) Prioritas 2; dan 22 desa (25,29%) prioritas 3. Desa prioritas 1 terdapat 1 desa di kecamatan Belitang Hulu ; Desa prioritas 2 tersebar 6 Desa di kecamatan Nanga Mahap, 2 Desa di Kecamatan Nanga Taman, 1 Desa di Kecamatan Belitang Hilir, dan 2 Desa di Kecamatan belitang Hulu ; Desa prioritas 3 tersebar 4 Desa di kecamatan Nanga Mahap, 4 Desa di Kecamatan Nanga Taman, 6 Desa di Kecamatan Sekadau Hulu, 2 Desa di Kecamatan Sekadau Hilir, 2 Desa di Kecamatan Belitang Hilir, 4 Desa di Kecamatan Belitang Hulu.
7. Karakteristik desa rentan pangan ditandai dengan (1) tingginya rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga; (2) tingginya rasio penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap total jumlah penduduk desa; (3) tingginya rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk; (4) kecilnya rasio luas lahan baku sawah terhadap total jumlah penduduk; dan (5) banyaknya akses penghubung di Desa yang kurang memadai.
8. Program-program peningkatan ketahanan pangan dan menangani kerentanan pangan desa diarahkan pada kegiatan :
 - a. Peningkatan penyediaan pangan di daerah non sentra produksi dengan mengoptimalkan sumberdaya pangan lokal.
 - b. Pembukaan lahan pertanian potensial baru, serta pengembangan diversifikasi pangan pokok berbasis sumber daya pangan lokal
 - c. Penanganan kemiskinan melalui penyediaan lapangan kerja, padat karya, redistribusi lahan; pembangunan infrastruktur dasar (jalan, air bersih), dan pemberian bantuan sosial; serta pembangunan usaha produktif/UMKM/padat karya untuk menggerakkan ekonomi wilayah.
 - d. Peningkatan akses air bersih melalui penyediaan fasilitas dan layanan air bersih; sosialisasi dan penyuluhan.
 - e. Penyediaan tenaga kesehatan.

PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2022



HASIL PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2022

No.	Nama Kec	Kode Kec	Kode Desa	Nama Desa	1. P.Lahan	2. P.Sarana	3. P.Tdk Sejahtera	4. P.Jalan	5. P.NoWater	6. P.Tenkes	INDEKS KOM	PERINGKAT	PRIO KOMP
1	NANGA MAHAP	6109010	6109010001	LANDAU APIN	6	1	1	3	1	2	40,04	82	2
2	NANGA MAHAP	6109010	6109010002	TELUK KEBAU	5	5	5	3	1	3	57,16	53	4
3	NANGA MAHAP	6109010	6109010003	LEMBAH BERINGIN	6	1	3	3	1	1	41,73	80	2
4	NANGA MAHAP	6109010	6109010004	KARANG BETUNG	3	3	1	3	1	2	34,27	85	2
5	NANGA MAHAP	6109010	6109010005	SEBABAS	2	2	1	4	1	1	45,12	74	3
6	NANGA MAHAP	6109010	6109010006	NANGA SURI	5	1	2	4	1	2	46,12	71	3
7	NANGA MAHAP	6109010	6109010007	NANGA MAHAP	4	6	4	4	3	6	71,90	10	6
8	NANGA MAHAP	6109010	6109010008	BATU PAHAT	4	1	6	4	5	3	66,10	26	5
9	NANGA MAHAP	6109010	6109010009	LANDAU KUMPAI	4	5	2	4	1	3	44,13	76	2
10	NANGA MAHAP	6109010	6109010010	TEMBAGA	6	5	1	3	1	2	42,09	79	2
11	NANGA MAHAP	6109010	6109010011	CENAYAN	3	3	2	4	1	2	45,88	72	3
12	NANGA MAHAP	6109010	6109010012	TEMBESUK	4	4	2	4	1	1	34,57	84	2
13	NANGA MAHAP	6109010	6109010013	TAMANG	4	4	2	4	1	3	47,83	67	3
14	NANGA TAMAN	6109020	6109020001	NANGA ENKGULUN	6	5	1	3	1	1	40,12	81	2
15	NANGA TAMAN	6109020	6109020002	NANGA KOMAN	4	2	4	4	1	4	51,89	61	3
16	NANGA TAMAN	6109020	6109020003	NANGA MONGKO	3	4	3	1	3	2	45,37	73	3
17	NANGA TAMAN	6109020	6109020004	LUBUK TAJAU	4	5	2	4	3	3	61,57	43	4
18	NANGA TAMAN	6109020	6109020005	PANTOK	4	3	1	4	1	4	51,87	62	3
19	NANGA TAMAN	6109020	6109020006	MERAGUN	3	4	1	4	3	1	45,03	75	3
20	NANGA TAMAN	6109020	6109020007	RIRANG JATI	6	3	3	4	6	1	68,05	22	5
21	NANGA TAMAN	6109020	6109020008	NANGA TAMAN	4	6	5	4	5	6	82,35	1	6
22	NANGA TAMAN	6109020	6109020009	SEANGAK	6	3	5	4	3	2	64,98	30	5

23	NANGA TAMAN	6109020	6109020010	SUNGAI LAWAK	6	5	2	4	2	1	60,72	45	4
24	NANGA TAMAN	6109020	6109020011	NANGA KIUNGKANG	6	5	4	4	4	4	70,59	12	6
25	NANGA TAMAN	6109020	6109020012	TAPANG TINGANG	6	1	3	3	1	1	43,82	77	2
26	NANGA TAMAN	6109020	6109020013	NANGA MENTUKAK	4	6	4	4	5	5	81,92	3	6
27	SEKADAU HULU	6109030	6109030001	SEKONAU	6	6	3	4	1	1	63,08	36	4
28	SEKADAU HULU	6109030	6109030002	CUPANG GADING	6	3	3	3	1	2	47,88	66	3
29	SEKADAU HULU	6109030	6109030003	NANGA BIABAN	2	6	1	3	1	3	47,54	69	3
30	SEKADAU HULU	6109030	6109030004	MONDI	4	6	1	4	2	2	47,71	68	3
31	SEKADAU HULU	6109030	6109030005	TAPANG PERODAH	6	3	1	3	1	6	48,67	65	3
32	SEKADAU HULU	6109030	6109030006	SUNGAI SAMBANG	6	4	2	4	1	2	54,67	55	3
33	SEKADAU HULU	6109030	6109030007	RAWAK HILIR	6	4	4	4	3	4	68,43	20	5
34	SEKADAU HULU	6109030	6109030008	RAWAK HULU	6	4	5	4	4	6	73,68	8	6
35	SEKADAU HULU	6109030	6109030009	TINTING BOYOK	6	6	6	3	4	3	70,04	13	5
36	SEKADAU HULU	6109030	6109030010	PERONGKAN	6	4	6	4	4	4	71,73	11	6
37	SEKADAU HULU	6109030	6109030011	NANGA MANTERAP	6	4	4	3	4	5	64,49	32	5
38	SEKADAU HULU	6109030	6109030012	BOTI	6	6	2	4	3	4	78,78	4	6
39	SEKADAU HULU	6109030	6109030013	SETAWAR	6	6	2	4	2	5	72,05	9	6
40	SEKADAU HULU	6109030	6109030014	NANGA PEMUBUH	6	2	3	4	2	3	61,77	41	4
41	SEKADAU HULU	6109030	6109030015	SUNSONG	5	3	1	3	4	4	46,72	70	3
42	SEKADAU HILIR	6109040	6109040001	PENITI	4	2	6	4	6	5	68,59	19	5
43	SEKADAU HILIR	6109040	6109040002	SUNGAI RINGIN	4	6	6	4	5	6	75,02	7	6
44	SEKADAU HILIR	6109040	6109040003	MUNGGUK	4	4	4	4	4	6	69,47	15	5
45	SEKADAU HILIR	6109040	6109040004	GONIS TEKAM	5	5	4	4	3	6	69,01	17	5
46	SEKADAU HILIR	6109040	6109040005	ENKERSIK	1	5	4	4	5	5	69,64	14	5
47	SEKADAU HILIR	6109040	6109040006	TAPANG SEMADAK	5	4	3	4	3	4	65,45	27	5
48	SEKADAU HILIR	6109040	6109040007	SERARAS	3	4	5	4	2	4	62,22	39	4
49	SEKADAU HILIR	6109040	6109040008	MERAPI	4	3	6	4	2	5	64,12	33	5
50	SEKADAU HILIR	6109040	6109040009	TANJUNG	5	2	5	3	1	2	53,37	59	3

51	SEKADAU HILIR	6109040	6109040010	SEBERANG KAPUAS	6	3	5	3	1	3	55,34	54	3
52	SEKADAU HILIR	6109040	6109040011	SUNGAI KUNYIT	6	5	3	3	3	5	61,71	42	4
53	SEKADAU HILIR	6109040	6109040012	SEMABI	6	4	3	3	4	3	62,46	38	4
54	SEKADAU HILIR	6109040	6109040013	LANDAU KODAH	6	5	4	3	3	3	62,83	37	4
55	SEKADAU HILIR	6109040	6109040014	TIMPUK	6	2	4	3	3	6	60,56	46	4
56	SEKADAU HILIR	6109040	6109040015	ENSALANG	6	3	6	4	6	5	75,49	6	6
57	SEKADAU HILIR	6109040	6109040016	SELALONG	6	6	6	4	6	6	82,18	2	6
58	SEKADAU HILIR	6109040	6109040017	BOKAK SEBUMBUN	6	6	4	4	5	4	77,94	5	6
59	BELITANG HILIR	6109050	6109050001	SUNGAI AYAK I	1	1	6	4	2	2	58,70	51	4
60	BELITANG HILIR	6109050	6109050002	SUNGAI AYAK DUA	2	2	6	4	2	6	62,08	40	4
61	BELITANG HILIR	6109050	6109050003	ENTABUK	3	6	4	3	3	4	65,30	28	5
62	BELITANG HILIR	6109050	6109050004	TAPANG PULAU	3	3	4	4	4	5	66,74	25	5
63	BELITANG HILIR	6109050	6109050005	MERBANG	6	2	5	3	3	4	61,33	44	4
64	BELITANG HILIR	6109050	6109050006	KUMPANG BIS	2	2	3	3	3	2	54,34	56	3
65	BELITANG HILIR	6109050	6109050007	MENAWAI TEKAM	4	2	3	3	1	1	42,47	78	2
66	BELITANG HILIR	6109050	6109050008	SEMADU	4	5	3	3	2	2	53,35	60	3
67	BELITANG HILIR	6109050	6109050009	EMPAJAK	6	2	6	3	3	3	59,58	49	4
68	BELITANG	6109060	6109060001	BELITANG SATU	2	3	4	4	2	4	59,70	48	4
69	BELITANG	6109060	6109060002	BELITANG DUA	4	4	4	4	2	6	63,12	34	4
70	BELITANG	6109060	6109060003	PADAK	6	3	4	4	3	5	67,76	24	5
71	BELITANG	6109060	6109060004	SETUNTUNG	4	2	6	4	3	4	64,59	31	5
72	BELITANG	6109060	6109060005	NANGA ANSAR	5	2	5	4	2	4	63,11	35	4
73	BELITANG	6109060	6109060006	MANUA PRAMA	3	3	5	4	4	6	68,24	21	5
74	BELITANG	6109060	6109060007	MABOH PERMAI	4	4	5	4	3	5	67,81	23	5
75	BELITANG HULU	6109070	6109070001	KUMPANG ILONG	6	2	5	4	4	5	68,73	18	5
76	BELITANG HULU	6109070	6109070002	IJOK	6	4	3	4	3	4	65,17	29	5
77	BELITANG HULU	6109070	6109070003	BALAI SEPUAK	5	6	4	4	3	6	69,32	16	5
78	BELITANG HULU	6109070	6109070004	TABUK HULU	6	3	4	4	1	4	59,95	47	4

79	BELITANG HULU	6109070	6109070005	BATUK MULAU	6	4	3	4	2	2	58,55	52	4
80	BELITANG HULU	6109070	6109070006	SEI TAPAH	6	2	2	3	2	2	50,83	64	3
81	BELITANG HULU	6109070	6109070007	SEBURUK SATU	6	3	1	2	1	2	33,28	86	2
82	BELITANG HULU	6109070	6109070008	SEBETUNG	6	3	1	4	2	6	54,04	57	3
83	BELITANG HULU	6109070	6109070009	PAKET MULAU	5	3	3	3	2	4	53,48	58	3
84	BELITANG HULU	6109070	6109070010	MENGARET	6	5	2	4	1	3	58,83	50	4
85	BELITANG HULU	6109070	6109070011	TERDUK DAMPAK	2	3	1	2	1	1	26,40	87	1
86	BELITANG HULU	6109070	6109070012	SEI ANTU HULU	6	2	2	2	1	4	39,79	83	2
87	BELITANG HULU	6109070	6109070013	BUKIT RAMBAT	4	3	4	4	1	4	51,38	63	3

6 Indikator :

1. Rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk
2. Rasio Jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga
3. Rasio jumlah penduduk tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk
4. Jumlah Desa tanpa akses penghubung memadai melalui darat, air dan udara
5. Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air terhadap jumlah rumah tangga
6. Rasio jumlah penduduk pertenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk

Prioritas 1 (Sangat Rentan)	: 1 Desa	(1,15%)	
Prioritas 2 (Rentan)	: 11 Dea	(12,64%)	
Prioritas 3 (Agak Rentan)	: 22 Desa	(25,29%)	Rentan : 39,08%
Prioritas 4 (Agak Tahan)	: 20 Desa	(22,99%)	
Prioritas 5 (Tahan)	: 21 Desa	(24,14%)	
Prioritas 6 (Sangat Tahan)	: 12 Desa	(13,79%)	Tahan : 60,92%

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Kabupaten Sekadau terdiri dari 7 kecamatan dan 78 desa dengan total penduduk tahun 2021 sebesar 212.878 jiwa (BPS). Secara geografis memanjang dari utara ke selatan di antara 111° 17'44" Bujur Timur dan memanjang dari barat ke timur di antara 00° 38' 23" Lintang Utara sampai 00° 44' 25" Lintang Selatan. Kabupaten Sekadau di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Sintang, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Ketapang, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sintang dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sanggau yang memiliki wilayah daratan seluas 6.263,07 km². Kecamatan terbesar luasnya adalah Kecamatan Nanga Mahap dengan luas 1.205,16 Km² atau 19% dari luas Kabupaten Sekadau, sedangkan Kecamatan yang terkecil luasnya yaitu Kecamatan Belitang sebesar 336,79 Km² atau sekitar 5,38% dari luas Kabupaten Sekadau.

Secara klimatologis, Kabupaten Sekadau merupakan daerah basah memiliki curah hujan lebih dari 2.000 mm per tahun dan daerah kering memiliki curah hujan kurang dari 2.000 mm per tahun.

Perekonomian Kabupaten Sekadau tergantung pada sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang masih mempunyai peranan tinggi terhadap PDRB atas dasar harga berlaku. Akan tetapi sektor ini terjadi fluktuasi pada angkanya dari tahun 2017-2021, perannya turun dari 38,06% di tahun 2017 menjadi 38% di tahun 2018, dan turun jadi 37,58% di tahun 2019, dan naik di tahun 2020 menjadi 39,77% (angka sementara) dan naik lagi tahun 2021 sebesar 41,43% (angka sangat sementara). Kenaikan ini disebabkan semua sub sektor yang ada dalam sektor mengalami kenaikan peranan. Selain sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, penyumbang PDRB terbesar kedua yaitu pedagang besar dan eceran, selanjutnya diikuti oleh sektor konstruksi, serta administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib.

Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 114 dan Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi Pasal 75 mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi, yang dapat digunakan untuk perencanaan, pemantauan dan evaluasi, stabilisasi pasokan dan harga pangan serta sebagai sistem peringatan dini terhadap masalah pangan dan kerawanan pangan dan gizi.

Informasi tentang ketahanan dan kerentanan pangan penting untuk memberikan informasi kepada para pembuat keputusan dalam pembuatan program dan kebijakan, baik di tingkat pusat maupun tingkat lokal, untuk lebih memprioritaskan intervensi dan program berdasarkan kebutuhan dan potensi dampak kerawanan pangan yang tinggi. Informasi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai salah satu instrumen untuk mengelola krisis pangan dalam rangka upaya perlindungan/penghindaran dari krisis pangan dan gizi baik jangka pendek, menengah maupun panjang.

Dalam rangka menyediakan informasi ketahanan pangan yang akurat dan komprehensif, disusunlah Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/*Food Security and Vulnerability Atlas-FSVA* sebagai instrumen untuk monitoring ketahanan pangan wilayah. Di tingkat nasional FSVA disusun sejak tahun 2002 bekerja sama dengan *World Food Programme (WFP)*. Kerjasama tersebut telah menghasilkan Peta Kerawanan Pangan (*Food Insecurity Atlas - FIA*) pada tahun 2005. Pada tahun 2009, 2015, 2018 disusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas - FSVA*).

Sebagai tindak lanjut penyusunan FSVA Nasional disusun pula FSVA Provinsi dengan analisis sampai tingkat kecamatan dan FSVA Kabupaten dengan analisis sampai tingkat desa. Dengan demikian, permasalahan pangan dapat dideteksi secara cepat sampai level yang paling bawah. FSVA kabupaten telah disusun sejak tahun 2012 dan dimutakhirkan pada tahun 2016. Untuk mengakomodir perkembangan situasi ketahanan pangan dan pemekaran wilayah desa, maka dilakukan pemutakhiran FSVA Kabupaten pada tahun 2019. Dan mulai tahun 2019 FSVA Kabupaten sudah disusun setiap tahun.

Seperti halnya FSVA Nasional dan Provinsi, FSVA Kabupaten menyediakan sarana bagi para pengambil keputusan untuk secara cepat dalam mengidentifikasi daerah yang lebih rentan, dimana investasi dari berbagai sektor seperti pelayanan jasa, pembangunan manusia dan infrastruktur yang berkaitan dengan ketahanan pangan dapat memberikan dampak yang lebih baik terhadap penghidupan, ketahanan pangan dan gizi masyarakat pada tingkat desa.

Pengembangan FSVA tingkat desa merupakan hal yang sangat penting, dimana kondisi ekologi dan kepulauan yang membentang dari timur ke barat, kondisi iklim yang dinamis dan keragaman sumber penghidupan masyarakat menunjukkan adanya perbedaan situasi ketahanan pangan dan gizi di masing-masing wilayah. FSVA Kabupaten akan menjadi alat yang sangat penting dalam perencanaan dan pengambilan keputusan untuk mengurangi kesenjangan ketahanan pangan.

1.2.KERANGKA KONSEP KETAHANAN PANGAN DAN GIZI

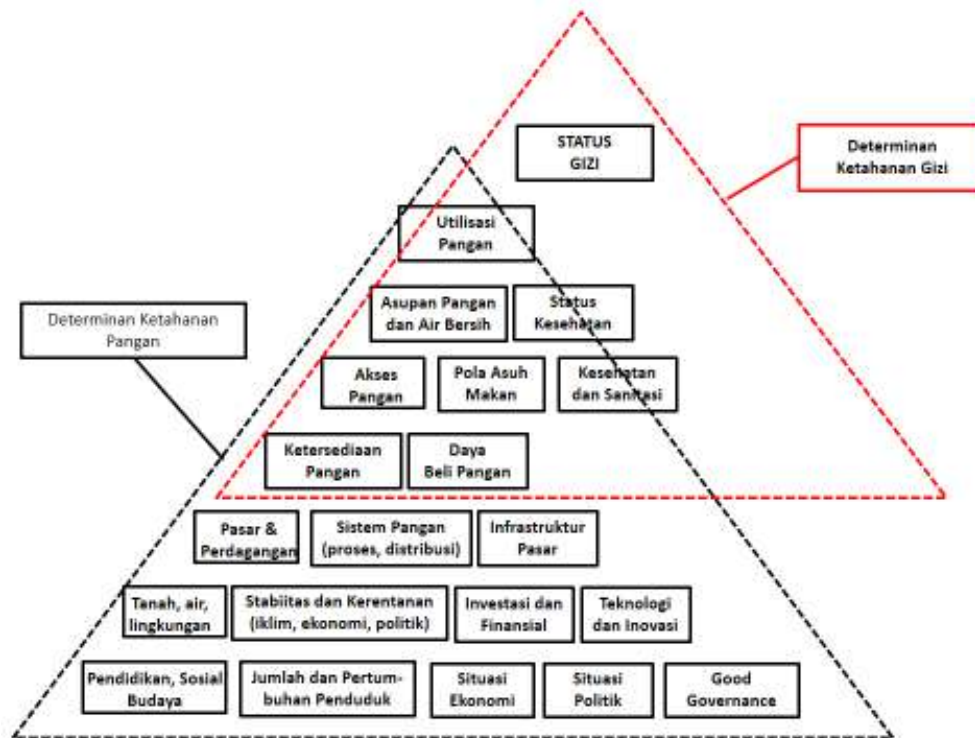
Peran pangan bukan hanya penting untuk memenuhi kebutuhan fisik dasar dan mencegah kelaparan, namun lebih jauh dari itu peran pangan dengan kandungan gizi di dalamnya bagi kecerdasan bangsa dan peningkatan kualitas

hidup manusia untuk menghasilkan manusia yang sehat, cerdas, aktif dan produktif seperti disebutkan dalam definisi ketahanan pangan. Kecukupan pemenuhan pangan dalam jumlah dan mutunya berkorelasi dengan produktivitas kerja dan pertumbuhan otak serta kecerdasan dan pada akhirnya berperan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam undang-undang didefinisikan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Menimbang pentingnya ketahanan pangan dalam pembangunan nasional, Bab III Undang-undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 mengamanatkan bahwa Pemerintah harus melakukan perencanaan penyelenggaraan pangan. Pada pasal 6, penyelenggaraan pangan diarahkan untuk mewujudkan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan.

Definisi ketahanan pangan (*food security*) yang dianut oleh *Food and Agricultural Organisation* (FAO) dan dirujuk oleh UU Pangan saat ini mengacu pada konsep awal *food security* yang dihasilkan oleh *World Food Summit* tahun 1996. Merujuk pada konsep tentang pentingnya *nutrition security* yang diajukan oleh Unicef pada awal tahun 1990an yang menambahkan aspek penyakit infeksi sebagai penyebab masalah gizi disamping ketahanan pangan rumahtangga, maka *International Food Policy Research Institute* (IFPRI) menyebut konsep ketahanan pangan FAO tersebut sebagai *Food and Nutrition Security*. Pada tahun 2012 FAO¹ mengajukan definisi *food security* menjadi *food and nutrition security* untuk menyempurnakan konsep dan definisi sebelumnya.

Upaya FAO ini sejalan dengan upaya *Standing Committee on Nutrition* (SCN), suatu lembaga non struktural yang juga berada di bawah United Nations (PBB) yang pada tahun 2013 juga merekomendasikan penyempurnaan definisi ketahanan pangan (*food security*) menjadi ketahanan pangan dan gizi (*food and nutrition security*). Dalam pemahaman baru ini, perwujudan ketahanan pangan tidak hanya berorientasi pada upaya penyediaan pangan dalam jumlah yang cukup bagi setiap individu, namun juga harus disertai upaya untuk meningkatkan efektivitas pemanfaatan pangan bagi terciptanya status gizi yang baik bagi setiap individu. Dalam konteks ini optimalisasi utilisasi pangan tidak cukup hanya dari kualitas pangan yang dikonsumsi, namun juga harus didukung oleh terhindarnya setiap individu dari penyakit infeksi yang dapat mengganggu tumbuh kembang dan kesehatan melalui kecukupan air bersih dan kondisi sanitasi lingkungan dan hygiene yang baik. Kerangka pikir ketahanan pangan dan gizi ini dituangkan dalam Gambar 1.1.



Gambar 1. Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi
(Sumber: FAO dan UNSCN)

Analisis dan pemetaan FSVA dilakukan berdasarkan pada pemahaman mengenai **ketahanan pangan dan gizi** seperti yang tercantum dalam Kerangka Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi (Gambar 1.1). Kerangka konseptual tersebut dibangun berdasarkan tiga pilar ketahanan pangan, yaitu: ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan, serta mengintegrasikan gizi dan kerentanan di dalam keseluruhan pilar tersebut.

Ketersediaan pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri, cadangan pangan, serta pemasukan pangan (termasuk didalamnya impor dan bantuan pangan) apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Ketersediaan pangan dapat dihitung pada tingkat nasional, regional, kecamatan dan tingkat masyarakat.

Akses pangan adalah **kemampuan rumah tangga untuk memperoleh** cukup pangan yang bergizi, melalui satu atau kombinasi dari berbagai sumber seperti: produksi dan persediaan sendiri, pembelian, barter, hadiah, pinjaman dan bantuan pangan. Pangan mungkin tersedia di suatu daerah tetapi tidak dapat diakses oleh rumah tangga tertentu jika mereka tidak mampu secara fisik, ekonomi atau sosial, mengakses jumlah dan keragaman makanan yang cukup.

Pemanfaatan pangan merujuk pada **penggunaan pangan oleh rumah tangga dan kemampuan individu** untuk menyerap dan memetabolisme zat gizi. Pemanfaatan pangan juga meliputi cara penyimpanan, pengolahan dan penyiapan makanan, keamanan air untuk minum dan memasak, kondisi kebersihan, kebiasaan pemberian makan (terutama bagi individu dengan kebutuhan makanan

khusus), distribusi makanan dalam rumah tangga sesuai dengan kebutuhan individu (pertumbuhan, kehamilan dan menyusui), dan status kesehatan setiap anggota rumah tangga. Mengingat peran yang besar dari seorang ibu dalam meningkatkan profil gizi keluarga, terutama untuk bayi dan anak-anak, pendidikan ibu sering digunakan sebagai salah satu *proxy* untuk mengukur pemanfaatan pangan rumah tangga.

Dampak gizi dan kesehatan merujuk pada status gizi individu, termasuk defisiensi mikronutrien, pencapaian morbiditas dan mortalitas. Faktor-faktor yang berhubungan dengan pangan, serta praktek-praktek perawatan umum, memiliki kontribusi terhadap dampak keadaan gizi pada kesehatan masyarakat dan penanganan penyakit yang lebih luas.

Kerentanan dalam peta ini selanjutnya merujuk pada kerentanan terhadap **kerawanan pangan dan gizi**. Tingkat kerentanan individu, rumah tangga atau kelompok masyarakat ditentukan oleh pemahaman terhadap faktor-faktor risiko dan kemampuan untuk mengatasi situasi tertekan.

Kerawanan pangan dapat menjadi kondisi yang kronis atau transien. **Kerawanan pangan kronis** adalah ketidakmampuan jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum dan biasanya berhubungan dengan struktural dan faktor-faktor yang tidak berubah dengan cepat, seperti iklim setempat, jenis tanah, sistem pemerintahan daerah, infrastruktur publik, sistem kepemilikan lahan, distribusi pendapatan dan mata pencaharian, hubungan antar suku, tingkat pendidikan, sosial budaya/adat istiadat dll.

Kerawanan pangan transien adalah ketidakmampuan sementara yang bersifat jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum yang sebagian besar berhubungan dengan faktor dinamis yang dapat berubah dengan cepat/tiba-tiba seperti penyakit menular, bencana alam, pengungsian, perubahan fungsi pasar, tingkat hutang dan migrasi. Perubahan faktor dinamis tersebut umumnya menyebabkan kenaikan harga pangan yang lebih mempengaruhi penduduk miskin dibandingkan penduduk kaya, mengingat sebagian besar dari pendapatan penduduk miskin digunakan untuk membeli makanan. Kerawanan pangan transien yang berulang dapat menyebabkan kerawanan aset rumah tangga, menurunnya ketahanan pangan dan akhirnya dapat menyebabkan kerawanan pangan kronis.

1.3. Metodologi

Kerentanan pangan dan gizi adalah masalah multi-dimensional yang memerlukan analisis dari sejumlah parameter. Kompleksitas masalah ketahanan pangan dan gizi dapat dikurangi dengan mengelompokkan indikator *proxy* ke dalam tiga kelompok yang berbeda tetapi saling berhubungan, yaitu ketersediaan pangan, keterjangkauan/akses rumah tangga terhadap pangan dan pemanfaatan pangan secara individu. Pertimbangan gizi, termasuk ketersediaan dan keterjangkauan bahan pangan bergizi tersebar dalam ketiga kelompok tersebut.

Indikator

Indikator Kerentanan terhadap kerawanan pangan tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten, memiliki karakteristik masing-masing sehingga tidak semua indikator nasional maupun provinsi dapat digunakan untuk memetakan kerentanan terhadap kerawanan pangan di tingkat kabupaten. Pemilihan indikator FSVA Kabupaten didasarkan pada: (i) hasil review terhadap pemetaan daerah rentan rawan pangan yang telah dilakukan sebelumnya; (ii) tingkat sensitivitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi; (iii) keterwakilan pilar ketahanan pangan dan gizi; dan (iv) ketersediaan data pada seluruh desa.

Indikator yang digunakan dalam FSVA Kabupaten terdiri dari 6 (enam) indikator yang mencerminkan tiga aspek ketahanan pangan.

Tabel 1.1. Indikator FSVA Kabupaten 2019

Indikator	Definisi	Sumber Data
A. Aspek Ketersediaan Pangan		
Rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk	Luas baku lahan sawah dibandingkan jumlah penduduk desa	<ul style="list-style-type: none">• BPS• DKP3 Kab. Sekadau 2021
Rasio jumlah sarana dan prasarana ekonomi terhadap jumlah rumah tangga	Jumlah sarana dan prasarana ekonomi (pasar, minimarket, toko, warung, restoran dll) dibandingkan jumlah rumah tangga desa	<ul style="list-style-type: none">• BPS Kabupaten Sekadau (PODES 2021)• Disdukcapil Kab. Sekadau 2021
B. Aspek Akses terhadap Pangan		
Rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk desa	Jumlah penduduk dengan status kesejahteraan terendah (penduduk dengan tingkat kesejahteraan pada Desil 1) dibandingkan jumlah penduduk desa	<ul style="list-style-type: none">• BPS• Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Kemensos 2020
Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai melalui darat atau air atau udara	Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai dengan kriteria: (1) Desa dengan sarana transportasi darat tidak dapat dilalui sepanjang tahun; (2) Desa dengan sarana transportasi air atau udara namun tidak tersedia angkutan umum	<ul style="list-style-type: none">• BPS Kabupaten Sekadau (PODES 2021)
C. Aspek Pemanfaatan Pangan		
Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga desa	Jumlah rumah tangga desil 1 s/d 4 dengan sumber air bersih tidak terlindung dibandingkan jumlah rumah tangga desa	<ul style="list-style-type: none">• Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Kemensos 2020• Disdukcapil Kab.

Indikator	Definisi	Sumber Data
		Sekadau 2020
Rasio penduduk per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk	Jumlah penduduk pertenaga kesehatan terdiri atas: 1) Dokter umum/spesialis; 2) dokter gigi; 3) bidan; 4) tenaga kesehatan lainnya (perawat, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, apoteker/asisten apoteker) dibandingkan kepatan penduduk	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Kesehatan, P2KB Kab. Sekadau BPS Kabupaten Sekadau (PODES 2020)

Metode Analisis

1. Analisis Indikator Individu

Analisis indikator individu dilakukan dengan mengelompokkan indikator individu kedalam beberapa kelas berdasarkan metode sebaran empiris. Sementara itu data kategorik mengikuti standar pengelompokkan yang sudah ditetapkan oleh BPS.

2. Analisis Komposit

Metodologi yang diadopsi untuk analisis komposit adalah dengan menggunakan metode pembobotan. Metode pembobotan digunakan untuk menentukan tingkat kepentingan relatif indikator terhadap masing-masing aspek ketahanan pangan. Metode pembobotan dalam penyusunan FSVA mengacu pada metode yang dikembangkan oleh *The Economist Intelligence Unit* (EIU) dalam penyusunan *Global Food Security Index* (EIU 2016 dan 2017) dan *International Food Policy Research Institute* (IFPRI) dalam penyusunan *Global Hunger Index* (IFPRI 2017). Goodridge (2007) menyatakan jika variabel yang digunakan dalam perhitungan indeks berbeda, maka perlu dilakukan secara tertimbang (pembobotan) untuk membentuk indeks agregat yang disesuaikan dengan tujuannya.

Langkah-langkah perhitungan analisis komposit adalah sebagai berikut:

- Standarisasi nilai indikator dengan menggunakan *z-score* dan *distance to scale* (0 – 100)
- Menghitung skor komposit kabupaten/kota dengan cara menjumlahkan hasil perkalian antara masing-masing nilai indikator yang sudah distandarisasi dengan bobot indikator, dengan rumus:

$$Y(j) = \sum_{n=1}^9 a_i X_{ij} \dots \dots \dots (1)$$

Dimana:

Y_j : Skor komposit kabupaten/kota ke-j

a_i : Bobot masing-masing indikator
 X_{ij} : Nilai standarisasi masing-masing indikator pada kabupaten/kota ke-j

Besaran bobot masing-masing indikator dibagi sama besar untuk setiap aspek ketahanan pangan, karena setiap aspek memiliki peran yang sama besar terhadap penentuan ketahanan pangan wilayah. Bobot untuk setiap indikator mencerminkan signifikansi atau pentingnya indikator tersebut dalam menentukan tingkat ketahanan pangan suatu wilayah.

Tabel 1.2 Bobot Indikator Individu

No	Indikator	Bobot
1.	Rasio luas baku lahan sawah terhadap luas wilayah desa	1/6
2.	Rasio jumlah sarana dan prasarana ekonomi terhadap jumlah rumah tangga	1/6
Sub Total		1/3
3.	Rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk desa	1/6
4.	Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai	1/6
Sub Total		1/3
5	Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga desa	1/6
6	Rasio jumlah tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk desa	1/6
Sub Total		1/3

- c. Mengelompokkan desa/kelurahan ke dalam 6 kelompok prioritas berdasarkan *cut off point* komposit. Skor komposit yang dihasilkan pada masing-masing wilayah dikelompokkan ke dalam 6 kelompok berdasarkan *cut off point* komposit. *Cut off point* komposit merupakan hasil penjumlahan dari masing-masing perkalian antara bobot indikator individu dengan *cut off point* indikator individu hasil standarisasi z-score dan *distance to scale* (0-100).

$$K(j) = \sum_{n=1}^9 a_i C_{ij} \dots\dots\dots (2)$$

Dimana:

K_j : *cut off point* komposit ke-J

a_i : Bobot indikator ke-i

C_{ij} : Nilai standarisasi *cut off point* indikator ke-I kelompok ke-j

Wilayah yang masuk ke dalam kelompok 1 adalah desa/kelurahan yang cenderung memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi daripada

desa/kelurahan dengan kelompok di atasnya, sebaliknya wilayah pada kelompok 6 merupakan desa/kelurahan yang memiliki ketahanan pangan paling baik. Penting untuk menegaskan kembali bahwa sebuah desa/kelurahan yang diidentifikasi sebagai relatif lebih tahan pangan (kelompok Prioritas 4-6), tidak berarti semua penduduk di dalamnya juga tahan pangan. Demikian juga, tidak semua penduduk di desa/kelurahan Prioritas 1-3 tergolong rentan pangan.

3. Pemetaan

Hasil analisis indikator individu dan komposit kemudian divisualisasikan dalam bentuk peta. Peta-peta yang dihasilkan menggunakan pola warna seragam dalam gradasi warna merah dan hijau. Gradasi merah menunjukkan variasi tingkat kerentanan pangan tinggi dan gradasi hijau menggambarkan variasi kerentanan pangan rendah. Untuk kedua kelompok warna tersebut, warna yang semakin tua menunjukkan tingkat yang lebih tinggi dari ketahanan atau kerentanan pangan.

BAB II

KETERSEDIAAN PANGAN

Undang-undang Pangan Nomor 18 tahun 2012 mendefinisikan ketersediaan pangan sebagai kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan. Sedangkan cadangan pangan nasional adalah persediaan pangan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat. Penyediaan pangan diwujudkan untuk memenuhi kebutuhan dan konsumsi pangan bagi masyarakat, rumah tangga dan perseorangan secara berkelanjutan.

Mayoritas bahan pangan yang diproduksi maupun didatangkan dari luar wilayah harus masuk terlebih dahulu ke pasar sebelum sampai ke rumah tangga. Oleh karena itu, selain kapasitas produksi pangan, keberadaan sarana dan prasarana penyedia pangan seperti pasar akan terkait erat dengan ketersediaan pangan di suatu wilayah.

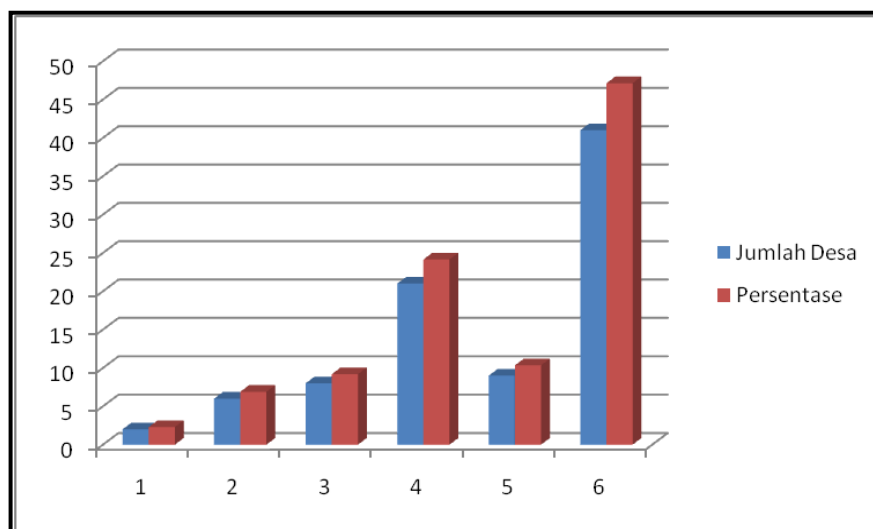
2.1. LAHAN PERTANIAN

Luas lahan pertanian di Kabupaten Sekadau masih belum dapat diketahui jelas datanya secara resmi, sehingga hanya rasio luas baku lahan sawah saja yang ada datanya. Rasio lahan sawah terhadap jumlah penduduk desa digunakan sebagai salah satu indikator dalam aspek ketersediaan pangan karena lahan sawah yang merupakan bagian dari lahan pertanian memiliki korelasi yang positif terhadap tingkat ketersediaan pangan dengan mempengaruhi kapasitas produksi pangan. Oleh sebab itu, semakin tinggi rasio luas lahan sawah terhadap jumlah penduduk desa maka diasumsikan ketersediaan pangan juga akan semakin baik, begitu pula sebaliknya.

Dari 87 desa di Kabupaten Sekadau, 2 desa masuk dalam prioritas 1 (2,3 %), 5 desa masuk dalam prioritas 2 (5,7 %) dan 9 desa prioritas 3 (10,3 %). Kecamatan yang memiliki rasio lahan prioritas 1-3 sebagian besar tersebar di Kecamatan Belitang Hilir yaitu sebanyak 4 desa.

Tabel 2.1 Sebaran rasio luas baku lahan sawah terhadap jumlah penduduk berdasarkan prioritas

Prioritas	Kategori	Jumlah Desa	Persentase
1	Sangat Rentan	2	2,3
2	Rentan	6	6,9
3	Agak Rentan	8	9,2
4	Agak Tahan	21	24,1
5	Tahan	9	10,3
6	Sangat Tahan	41	47,1



Gambar 2.1. Sebaran rasio luas baku lahan sawah terhadap total lahan berdasarkan prioritas

Tabel 2.2 Sebaran Desa di Kecamatan dengan rasio luas baku lahan sawah terhadap jumlah penduduk berdasarkan prioritas 1-3 (rentan pangan)

No.	Kecamatan	Prioritas			Total Desa
		1	2	3	
1	SEKADAU HILIR	1	-	1	2
2	SEKADAU HULU	-	1	-	1
3	NANGA TAMAN	-	-	2	2
4	NANGA MAHAP	-	1	2	3
5	BELITANG HILIR	1	2	2	5

6	BELITANG	-	1	1	2
7	BELITANG HULU	-	1	-	1

Dari data tersebut di atas dapat dilihat bahwa rasio luas baku lahan sawah terhadap jumlah penduduk yang paling kecil atau masuk dalam kondisi rentan rawan pangan (prioritas 1-3) Desa yang paling banyak terdapat di Kecamatan Belitang Hilir sebanyak 5 desa; disusul Kecamatan Nanga Mahap sebanyak 3 desa; Kecamatan Sekadau Hilir, Kecamatan Nanga Taman dan Kecamatan Belitang masing-masing 2 desa; dan Kecamatan Sekadau Hulu dan Kecamatan Belitang Hulu masing-masing 1 desa.

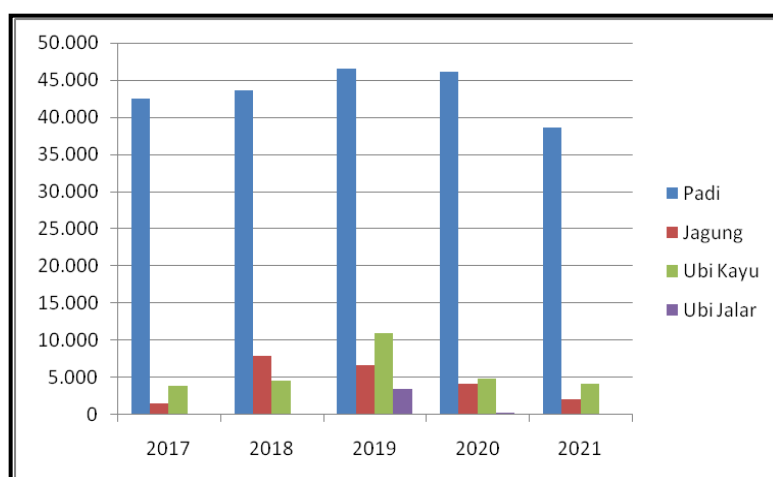
2.2. PRODUKSI

Pemerintah Kabupaten Sekadau telah mempromosikan produksi pertanian dan telah mengadopsi beberapa tindakan perlindungan bagi petani. Pertanian (termasuk peternakan, kehutanan, dan perikanan) telah memberikan kontribusi sebesar 41,43 % dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Sekadau pada tahun 2021 dan memberikan peluang yang signifikan untuk berkontribusi dalam meningkatkan ketahanan pangan, penanggulangan kemiskinan, dan dinamika pertumbuhan ekonomi. Padi masih merupakan bahan pokok di Kabupaten Sekadau yang menyumbang hampir 86% dari total produksi serealial kabupaten. Berdasarkan Tabel 2.3 dan Gambar 2.2. produksi jagung dan umbi-umbian di Kabupaten Sekadau mengalami peningkatan dan juga penurunan sejak tahun 2016. Peningkatan dan penurunan ini terutama disebabkan oleh masyarakat masih belum fokus membudidayakan umbi-umbian karena pemasarannya yang masih belum menjanjikan bagi petani. Meskipun sudah cukup lama pemerintah menggalakkan program konsumsi komoditas serealial lain selain beras dalam rangka mengurangi konsumsi beras dan terigu, tetapi masih sulit bagi masyarakat beralih dari konsumsi nasi sebagai makanan pokok. Produksi padi meningkat dari tahun 2017 sampai tahun 2019, tetapi mengalami penurunan pada tahun 2020 sampai tahun 2021 sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.3.

Tabel 2.3 Produksi Serealial Pokok dan Umbi-umbian 2017-2021 (Ton)

Serealial	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-rata 5 tahun
Padi	42.561	43.612	46.575	46.152	38.583	43.497
Jagung	1.562	7.870	6.694	4.215	2.063	4.481
Ubi Kayu	3.857	4.578	11.005	4.854	4.155	5.690
Ubi Jalar	83	21	3.528	290	0	784

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Sekadau, 2022



Gambar 2.2 Produksi Serealia dan umbi-umbian tahun 2017-2021

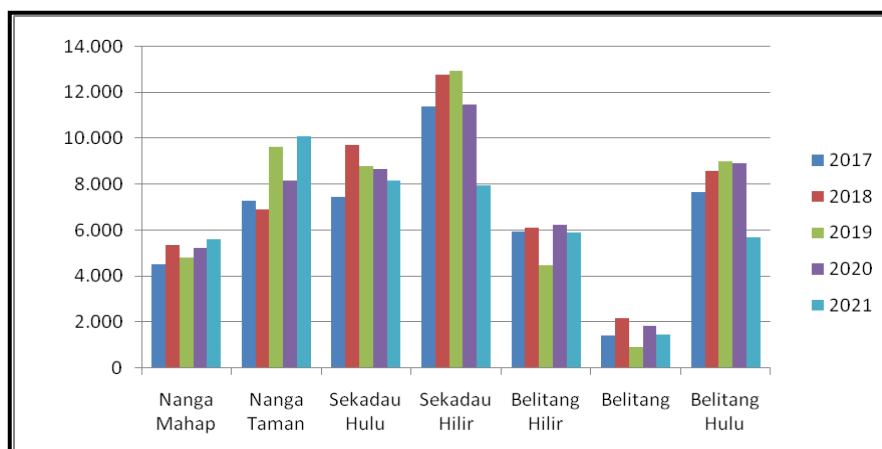
Pada Tabel 2.4 di bawah ini dapat diketahui dari total produksi serealia dapat dilihat laju pertumbuhan produksi tahun 2017-2021 menunjukkan pertumbuhan sebesar 16,33 %. Sebaran total produksi serealia selama 5 tahun terbesar terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 51.566 ton dan terkecil pada tahun 2016 yaitu sebesar 33,299 Ton.

Tabel 2.4 Produksi Total Serealia per Tahun dan Laju Pertumbuhan Produksi (2016-2020)

Kecamatan	Produksi Total Serealia					Laju Pertumbuhan 2017 - 2021
	2017	2018	2019	2020	2021	
Nanga Mahap	4.534	5.335	4804	5.204	5.580	5,82
Nanga Taman	7.263	6.895	9609	8.161	10.076	10,67
Sekadau Hulu	7.423	9.713	8783	8.641	8.144	3,48
Sekadau Hilir	11.350	12.761	12917	11.450	7.935	-7,1
Belitang Hilir	5.926	6.106	4480	6.212	5.887	2,46
Belitang	1.402	2.169	940	1.818	1.481	18,23
Belitang Hulu	7.634	8.587	8976	8.881	5.698	-4,97
Total	45.532	51.566	50.509	50.367	44.801	29,58

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Sekadau.

Dapat dilihat dari tabel-tabel di atas dapat diketahui secara umum produksi padi, jagung, umbi-umbian mengalami penurunan khususnya di tahun 2019 dibandingkan tahun sebelumnya. Dari rata-rata laju pertumbuhan produksi juga relatif tidak tinggi bahkan di Kecamatan Sekadau Hilir dan Belitang Hulu laju pertumbuhan dalam 5 tahun terakhir minus, hal ini disebabkan karena banyak peralihan lahan ke perkebunan kelapa sawit. Masyarakat berpandangan bahwa kebun kelapa sawit lebih menjanjikan daripada tanaman pangan dan hortikultura. Fenomena ini agak mengkhawatirkan ditengah giatnya pemerintah dengan program peningkatan produksi makanan pokok agar dapat mengurangi impor beras serta gencarnya promosi atau kampanye penganeekaragaman konsumsi pangan lokal selain beras yang berasal dari sereal lain dan umbi-umbian.



Gambar 2.3 Jumlah Produksi Total Sereal per Tahun periode 2017-2021

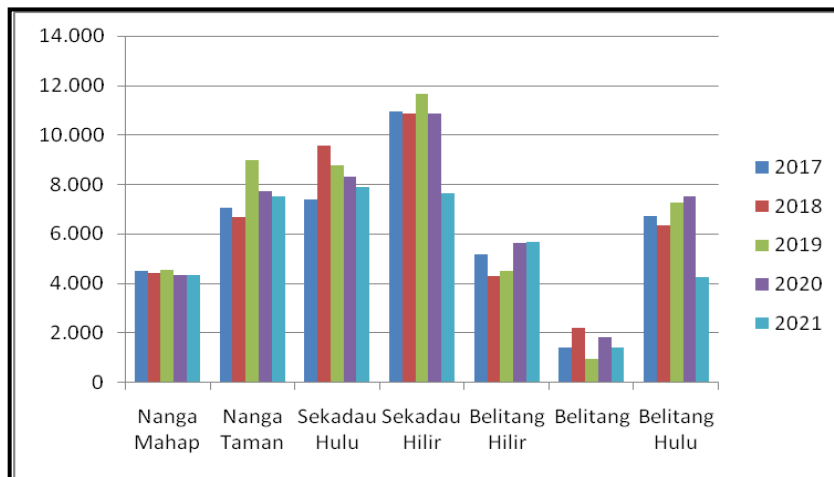
Padi

Produksi padi pada tingkat kecamatan di Kabupaten Sekadau selama 5 tahun terakhir (2017-2021) telah dianalisis dan disajikan pada Tabel 2.5. Produksi padi mengalami peningkatan pada tahun 2017 dan 2018, dan menurun pada tahun 2019, 2020 dan 2021 bervariasi di 7 kecamatan dan berdasarkan angka sementara di tahun 2020 ada penurunan produksi di sebagian Kecamatan. Peningkatan produksi padi tertinggi terjadi di kecamatan Sekadau Hilir sebesar 11.646 ton pada tahun 2019.

Tabel 2.5 Produksi Padi 2017 - 2021 (Ton)

Kecamatan	Padi				
	2017	2018	2019	2020	2021
1. Nanga Mahap	4.487	4.382	4.531	4.331	4.315
2. Nanga Taman	7.054	6.649	8.958	7.720	7.497
3. Sekadau Hulu	7.397	9.571	8.770	8.294	7.875
4. Sekadau Hilir	10.949	10.838	11.646	10.840	7.637
5. Belitang Hilir	5.138	4.272	4.476	5.637	5.657
6. Belitang	1.402	2.169	940	1.818	1.387
7. Belitang Hulu	6.725	6.315	7.253	7.512	4.215
Jumlah	43.152	44.196	46.574	46.152	38.583

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Sekadau.



Gambar 2.4 Produksi Padi Tahun 2017-2021

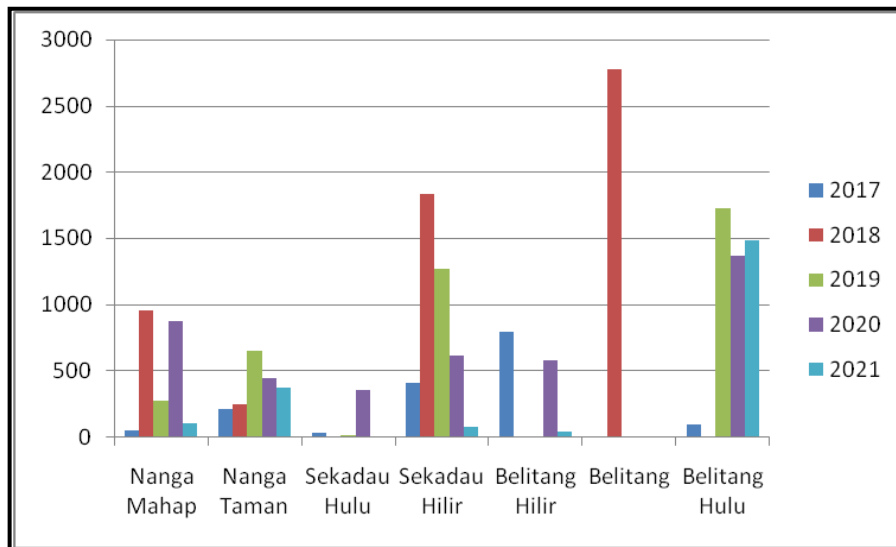
Jagung

Pada tahun 2018, produksi jagung mencapai produksi tertinggi yaitu sebesar 7.870 ton. Jumlah ini meningkat dari 2 tahun sebelumnya bahkan 2 tahun berikutnya 2019 dan 2020 terjadi penurunan menjadi 3.934 ton dan 4.215 ton. Pada Tahun 2020 kontribusi terbesar produksi jagung terjadi di Kecamatan Belitang Hulu sebesar 1.369 ton, menyusul Kecamatan Nanga Mahap sebesar 873 ton dan terendah Kecamatan Belitang yaitu tidak ada produksi jagung sebesar 0 ton. Secara rinci produksi jagung tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6 Produksi Jagung 2017 - 2021 (Ton)

Kabupaten	Jagung				
	2017	2018	2019	2020	2021
1. Nanga Mahap	47	953	273	873	99,18
2. Nanga Taman	209	246	651	441	371,93
3. Sekadau Hulu	26	142	13	347	-
4. Sekadau Hilir	401	1.923	1.271	610	69,43
5. Belitang Hilir	788	1.834	4	575	38,67
6. Belitang	-	-	-	-	-
7. Belitang Hulu	90	2.772	1.723	1369	1482,74
Jumlah	1.561	5.805	3.935	4.215	2.061,94

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Sekadau.



Gambar 2.5 Produksi Jagung 2017 - 2021 (Ton)

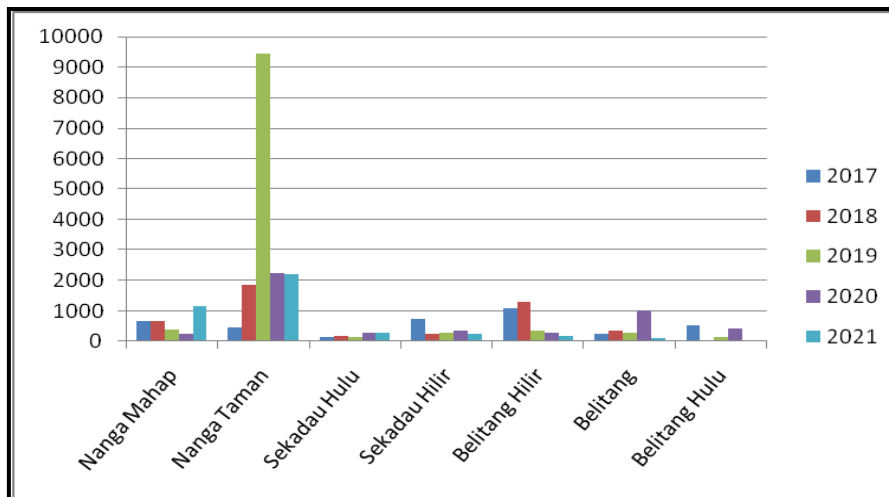
Ubi Kayu

Produksi ubi kayu di Kabupaten Sekadau mengalami fluktuasi (meningkat/menurun) selama periode 2017-2021. Pada tahun 2017, 2018 dan 2019 terjadi kenaikan jumlah produksi ubi kayu, dan menurun di tahun 2020 dan 2021 ini. Daerah penyumbang produksi terbanyak sepanjang periode 2017-2021 yaitu di Kecamatan Nanga Taman sebesar 9.435 ton di tahun 2019 dan disusul Kecamatan lain, begitu juga pada tahun 2021 penyumbang produksi ubi kayu tertinggi di Kecamatan Nanga taman sebesar 2.207 ton. Data produksi ubi kayu secara seluruhnya dapat dilihat pada Tabel 2.7.

Tabel 2.7 Produksi Ubi Kayu 2017 - 2021 (Ton)

Kecamatan	Ubi Kayu				
	2017	2018	2019	2020	2021
1. Nanga Mahap	680	676	387	247	1.166
2. Nanga Taman	445	1.856	9.435	2.238	2.207
3. Sekadau Hulu	138	177	152	296	269
4. Sekadau Hilir	742	236	270	362	229
5. Belitang Hilir	1.098	1.279	340	280	191
6. Belitang	228	353	281	1.020	93
7. Belitang Hulu	525	-	141	411	0
Jumlah	3.857	4.578	11.005	4.854	4.155

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Sekadau.



Gambar 2.7 Produksi Ubi Kayu 2017 - 2021 (Ton)

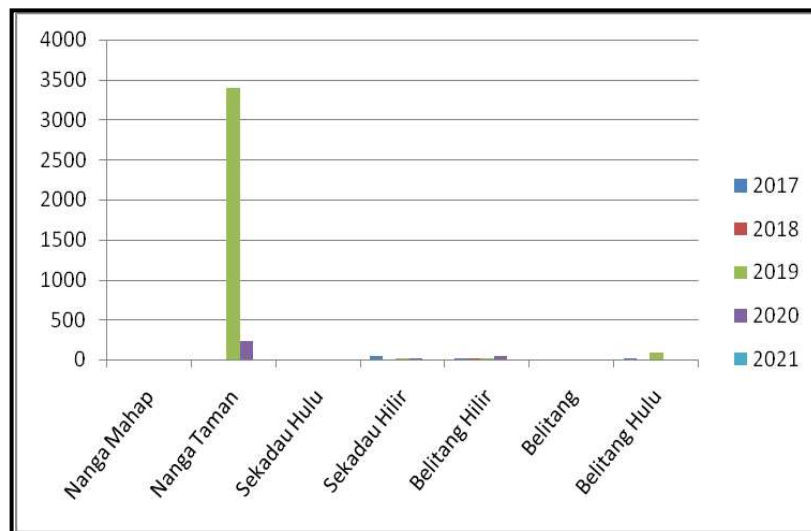
Ubi Jalar

Produksi ubi jalar trennya menurun dari tahun ke tahun, produksi terbesar selama kurun waktu 5 tahun (2017 - 2021) terjadi pada tahun 2019, yaitu sebesar 3.528 ton dan Kecamatan Nanga Taman merupakan penyumbang terbesar yaitu sebesar 3.402 ton. Selanjutnya Tahun 2020 produksi ubi jalar kembali turun menjadi 290 ton dan semakin menurun dengan tidak adanya produksi dalam daerah sekadau tahun 2021 bernilai nihil yaitu 0, adapun rincian produksi ubi jalar ini disajikan pada Tabel 2.8.

Tabel 2.8 Produksi Ubi Jalar 2017 - 2021 (Ton)

Kabupaten	Ubi jalar				
	2017	2018	2019	2020	2021
1. Nanga Mahap	-	-	-	-	0
2. Nanga Taman	-	-	3.402	232	0
3. Sekadau Hulu	-	-	-	-	0
4. Sekadau Hilir	42	-	21	19	0
5. Belitang Hilir	21	21	21	39	0
6. Belitang	-	-	-	-	0
7. Belitang Hulu	19	-	84	-	0
Jumlah	82	21	3.528	290	0

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Sekadau.



Gambar 2.8 Produksi Ubi Jalar 2017 - 2021 (Ton)

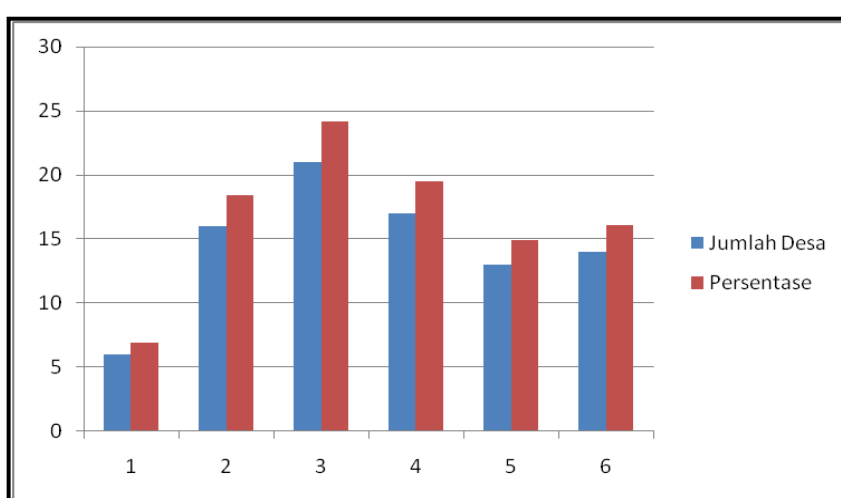
2.3. SARANA DAN PRASARANA EKONOMI

Rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga adalah perbandingan antara jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan (pasar, minimarket, toko, warung, restoran, dll) dengan jumlah rumah tangga di desa. Sarana dan prasarana penyedia pangan diasumsikan sebagai tempat penyimpanan pangan (stok pangan) yang diperoleh dari petani sebagai produsen pangan maupun dari luar wilayah, yang selanjutnya disediakan bagi masyarakat untuk konsumsi. Oleh karena itu, semakin tinggi rasio sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga di desa maka diasumsikan semakin baik tingkat ketersediaan pangan di desa tersebut.

Dari 87 desa di Kabupaten Sekadau, 6 desa masuk dalam prioritas 1 (6,9 %), 16 desa prioritas 2 (18,4 %) dan 21 desa prioritas 3 (24,1%).

Tabel 2.8 Sebaran rasio sarana prasarana ekonomi berdasarkan prioritas

Prioritas	Rasio Sarana Ekonomi	Jumlah Desa	Persentase
1	Sangat Rentan	6	6,9
2	Rentan	16	18,4
3	Agak Rentan	21	24,1
4	Agak Tahan	17	19,5
5	Tahan	13	14,9
6	Sangat Tahan	14	16,1



Gambar 2.9 Sebaran rasio sarana prasarana ekonomi berdasarkan prioritas

Tabel 2.9 Sebaran Desa di Kecamatan dengan rasio sarana prasarana ekonomi berdasarkan prioritas 1-3 (rentan pangan)

No.	Kecamatan	Prioritas			Total Desa
		1	2	3	
1	SEKADAU HILIR	-	3	3	6
2	SEKADAU HULU	-	1	3	4
3	NANGA TAMAN	1	1	3	5
4	NANGA MAHAP	4	1	2	7
5	BELITANG HILIR	1	5	1	7
6	BELITANG	-	2	3	5
7	BELITANG HULU	-	3	6	9

Dari data tersebut di atas dapat dilihat bahwa rasio sarana prasarana ekonomi yang masih kurang atau masuk dalam kondisi rentan rawan pangan (prioritas 1-3) Desa yang paling banyak terdapat di Kecamatan Belitang Hulu yaitu sebanyak 9 Desa, disusul Kecamatan Nanga Mahap, Kecamatan Belitang Hilir, Sekadau Hilir, Belitang dan Sekadau Hulu.

2.4. STRATEGI PEMENUHAN KETERSEDIAAN PANGAN

Rata-rata laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Sekadau dari tahun 2010-2021 mencapai 1,55% per tahun, sementara pertumbuhan produksi padi dan jagung mencapai 16,49 %. Rata-rata skor individu rasio lahan baku sawah dibandingkan jumlah penduduk desa pada prioritas 1-3 adalah sebesar 10,82%. Rata-rata skor individu rasio sarana ekonomi penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga pada prioritas 1-3 mencapai 20,44%. Hal tersebut menjadi tantangan dalam pemenuhan ketersediaan pangan di Kabupaten Sekadau.

Merujuk pada Agenda prioritas pembangunan Kabupaten Sekadau, strategi pokok pembangunan ketahanan pangan dan pertanian Kabupaten Sekadau khususnya dalam rangka pemenuhan ketersediaan pangan meliputi :

1. Peningkatan produksi Pertanian, Perkebunan, Perikanan, dan Peternakan
2. Peningkatan produktivitas Pertanian, Perkebunan, Perikanan, dan Peternakan
3. Peningkatan kesejahteraan petani dan buruh
4. Peningkatan ketahanan pangan
5. Meningkatkan kesempatan kerja
6. Optimalisasi penanganan perselisihan hubungan industrial
7. Meningkatkan kualitas organisasi dan kewirausahaan pemuda
8. Meningkatkan pengembangan wirausaha
9. Peningkatan kelancaran distribusi barang

BAB III

AKSES TERHADAP PANGAN

Keterjangkauan pangan atau akses terhadap pangan adalah kemampuan rumah tangga untuk memperoleh cukup pangan, baik yang berasal dari produksi sendiri, stok, pembelian, barter, hadiah, pinjaman dan bantuan pangan. Pangan mungkin tersedia di suatu wilayah tetapi tidak dapat diakses oleh rumah tangga tertentu karena terbatasnya: (1) **Akses ekonomi**: kemampuan keuangan untuk membeli pangan yang cukup dan bergizi; (2) **Akses fisik**: keberadaan infrastruktur untuk mencapai sumber pangan; dan/atau (3) **Akses sosial**: modal sosial yang dapat digunakan untuk mendapatkan dukungan informal dalam mengakses pangan, seperti barter, pinjaman atau program jaring pengaman sosial. Dalam penyusunan FSVA Kabupaten, indikator yang digunakan dalam aspek keterjangkauan pangan hanya mewakili akses ekonomi dan fisik saja, yaitu: (1) Rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk desa; dan (2) Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai melalui darat, air atau udara.

3.1 PENDUDUK DENGAN TINGKAT KESEJAHTERAAN TERENDAH

Berbagai program penanggulangan kemiskinan sudah dijalankan oleh pemerintah termasuk pemerintah Kabupaten Sekadau yang bersinergi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Provinsi, persentase penduduk miskin terjadi fluktuasi (turun dan naik) dari tahun 2014-2021. Dari tahun 2017 terjadi penurunan jumlah penduduk miskin, tetapi naik lagi pada tahun 2021. Pada tahun 2020 terdapat 11.920 jiwa jumlah penduduk miskin Kabupaten Sekadau kembali naik tahun 2021 sebanyak 12.685 jiwa (5,87% menjadi 6,25%).

Tabel 3.1 Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Sekadau

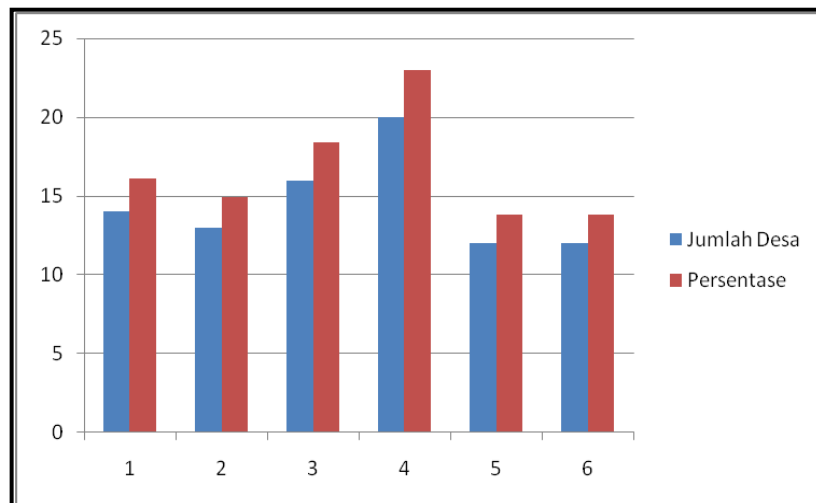
Keterangan	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase penduduk miskin	6,46	6,16	6,11	5,87	6,25

Sumber: Kabupaten Sekada Dalam Angka 2022, BPS.

Pada tingkat desa berdasarkan data dari Kementerian Sosial Republik Indonesia terdapat 14 Desa masuk kategori sangat rentan terhadap pangan (prioritas 1), 13 Desa masuk kategori rentan terhadap pangan (prioritas 2), 16 desa dengan kategori agak rentan (prioritas 3). Oleh karena itu, program-program penanggulangan kemiskinan Kabupaten ke depan masih harus ditingkatkan dan diprioritaskan di 43 desa tersebut.

Tabel 3.2 Sebaran desa dengan tingkat kesejahteraan terendah berdasarkan skala prioritas

Prioritas	Kategori	Jumlah Desa	Persentase
1	Sangat Rentan	14	16,1
2	Rentan	13	14,9
3	Agak Rentan	16	18,4
4	Agak Tahan	20	23
5	Tahan	12	13,8
6	Sangat Tahan	12	13,8



Gambar 3.1 Jumlah dan presentase desa dengan tingkat kesejahteraan terendah berdasarkan skala prioritas

Tabel 3.3 Sebaran desa di Kecamatan dengan tingkat kesejahteraan terendah berdasarkan prioritas 1-3 (rentan pangan)

No.	Kecamatan	Prioritas			Total
		1	2	3	
1	SEKADAU HILIR	0	0	3	3
2	SEKADAU HULU	4	3	3	10
3	NANGA TAMAN	3	2	3	8
4	NANGA MAHAP	4	5	1	10
5	BELITANG HILIR	0	0	3	3
6	BELITANG	0	0	0	0
7	BELITANG HULU	3	3	3	9

Dari data tersebut di atas dapat dilihat bahwa desa dengan tingkat kesejahteraan terendah paling banyak atau masuk dalam kondisi rentan rawan pangan (prioritas 1-3) yaitu paling banyak di Kecamatan Sekadau Hulu dan Nanga Mahap masing-masing sebanyak 10 Desa, disusul Kecamatan Belitang Hulu sebanyak 9 Desa, Nanga Taman sebanyak 8 Desa, Belitang Hilir sebanyak 3 Desa dan Sekadau Hilir sebanyak 3 Desa.

3.2 AKSES TRANSPORTASI

Kurangnya akses terhadap infrastruktur menyebabkan kemiskinan, dimana masyarakat yang tinggal di daerah terisolir atau terpencil dengan kondisi geografis yang sulit dan ketersediaan pasar yang buruk kurang memiliki kesempatan ekonomi dan pelayanan jasa yang memadai. Dengan kata lain, kelompok miskin ini masih kurang mendapatkan akses terhadap program pembangunan pemerintah. Investasi pada infrastruktur, khususnya infrastruktur transportasi (jalan, pelabuhan, bandara dan lain-lain), listrik, infrastruktur pertanian (irigasi), fasilitas pendidikan dan kesehatan dapat sepenuhnya mengubah suatu wilayah sehingga menciptakan landasan pertumbuhan ekonomi dan partisipasi yang lebih besar dari masyarakat yang tinggal di daerah terpencil.

Pada sektor pertanian, faktor yang menyebabkan tingkat pendapatan yang rendah adalah rendahnya harga komoditas pertanian di tingkat petani/produsen (*farm gate price*) di daerah perdesaan dibandingkan dengan harga di perkotaan untuk komoditas dengan kualitas sama (komoditas belum diubah atau diproses). Rendahnya harga komoditas pertanian ditingkat petani merupakan akibat dari tingginya biaya transportasi untuk pemasaran hasil pertanian dari desa surplus. Biaya transportasi akan lebih tinggi pada moda kendaraan bermotor-melewati jalan setapak dan jalan kecil dengan tenaga manusia atau hewan, misalnya pada daerah yang tidak memiliki akses jalan yang memadai. Dalam sebuah kajian cepat mengenai penyebab kemiskinan pada desa terpencil di 5 kabupaten di Indonesia diketahui bahwa tingginya biaya transportasi merupakan penyebab utama terjadinya kemiskinan tersebut. Tingginya harga komoditas pertanian di tingkat petani akan meningkatkan pendapatan yang diterima oleh masyarakat petani. Walaupun demikian, peningkatan pendapatan saja tanpa dibarengi dengan perbaikan akses terhadap pelayanan jasa dan infrastruktur belum cukup untuk menjamin kesejahteraan masyarakat petani.

Keterbelakangan infrastruktur menghalangi laju perkembangan suatu wilayah. Infrastruktur yang lebih baik akan menarik investasi yang lebih besar pada berbagai sektor, yang pada akhirnya dapat menjadi daya dorong bagi penghidupan yang berkelanjutan.

Berdasarkan data PODES (Potensi Desa) BPS tahun 2020, di Kabupaten Sekadau sebagian besar memiliki akses penghubung memadai, hanya sebagian kecil yang belum. Adapun kriteria desa tanpa akses penghubung memadai dengan mempertimbangkan sarana dan prasarana transportasi darat, air dan udara yaitu : (1) Desa dapat dilalui sepanjang tahun; atau (2) Desa dapat dilalui sepanjang tahun kecuali saat tertentu (ketika turun hujan, pasang, dll), (3) Dapat dilalui selama musim kemarau, dan (4) tidak dapat dilalui sepanjang tahun. Adapun jumlah desa yang masuk dalam kategori rentan prioritas 1 dan 2 secara garis besar dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.4 Sebaran desa di Kecamatan yang tidak memiliki akses penghubung memadai berdasarkan prioritas 1-3 (rentan pangan)

No.	Kecamatan	Prioritas		Total
		1	2	
1	SEKADAU HILIR	-	-	-
2	SEKADAU HULU	-	-	-
3	NANGA TAMAN	1 Desa	-	1 Desa
4	NANGA MAHAP	-	-	-
5	BELITANG HILIR	-	-	-
6	BELITANG	-	-	-
7	BELITANG HULU	-	3 Desa	3 Desa

Dari data tersebut di atas dapat dilihat bahwa desa memiliki akses penghubung memadai terdapat 1 Desa di Kecamatan Nanga Taman, dan 3 Desa di Kecamatan Belitang Hulu. Desa Lainnya tergolong dalam kategori prioritas 3 dan 4 yaitu tahan pangan.

Jalan merupakan moda transportasi utama di Kabupaten Sekadau akan tetapi terdapat beberapa kecamatan di mana moda transportasi air masih menjadi bagian penting dari moda transportasinya. Kondisi geografis hanya memungkinkan menggunakan moda transportasi air diantaranya perahu motor dan kapal ferry contohnya untuk menuju Kecamatan Belitang Hilir, Belitang dan Belitang Hulu sebagian besar harus melewati sungai kapuas yang terletak di Kecamatan Belitang Hilir. Data yang akurat untuk moda transportasi air tidak tersedia, jenis transportasi ini tidak dimasukkan sebagai salah satu indikator akses infrastruktur.

3.3 STRATEGI PENINGKATAN AKSES PANGAN

Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau untuk menanggulangi kemiskinan seperti yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Sekadau tahun 2021-2026 diantaranya:

1. Meningkatkan keberdayaan sosial
2. Optimalisasi upaya penanggulangan resiko kelompok rentan
3. Meningkatkan kualitas pelayanan sosial

Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau untuk mengatasi hambatan akses penghubung seperti yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Sekadau tahun 2021-2026 diantaranya:

1. Meningkatkan akses jalur kabupaten serta konektivitas dengan jalan provinsi dan nasional di Kab Sekadau
2. Meningkatkan kualitas jalan kabupaten yang terbangun

BAB IV

PEMANFAATAN PANGAN

Aspek ketiga dari konsep ketahanan pangan adalah pemanfaatan pangan. Pemanfaatan pangan meliputi: (1) Pemanfaatan pangan yang bisa di akses oleh rumah tangga; dan (2) Kemampuan individu untuk menyerap zat gizi secara efisien oleh tubuh. Pemanfaatan pangan juga meliputi cara penyimpanan, pengolahan, dan penyajian makanan termasuk penggunaan air selama proses pengolahannya serta kondisi budaya atau kebiasaan dalam pemberian makanan terutama kepada individu yang memerlukan jenis pangan khusus sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu (saat masa pertumbuhan, kehamilan, menyusui, dll) atau status kesehatan masing-masing individu. Dalam penyusunan FSVA Kabupaten, aspek pemanfaatan pangan meliputi indikator sebagai berikut: (1) Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga; dan (2) Rasio jumlah penduduk desa per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk.

4.1 AKSES TERHADAP AKSES AIR BERSIH

Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga merupakan perbandingan antara jumlah rumah tangga Desil 1-4 dengan sumber air bersih tidak terlindungi dengan jumlah rumah tangga di desa. Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak. Sumber air bersih yang tidak terlindungi berpotensi meningkatkan angka kesakitan serta menurunkan kemampuan dalam menyerap makanan yang pada akhirnya akan mempengaruhi status gizi individu.

Dapat dilihat pada tabel di bawah ini diketahui bahwa masih sebagian besar desa masih belum memiliki akses terhadap air bersih yang memadai yaitu sebesar 66% desa masuk dalam kategori rentan pangan (Prioritas 1-3).

Tabel 4.1 Sebaran desa berdasarkan rumah tangga tanpa akses air bersih berdasarkan skala prioritas

Prioritas	Kategori	Jumlah Desa	Persentase
1	Sangat Rentan	29	33,3
2	Rentan	16	18,4
3	Agak Rentan	21	24,1
4	Agak Tahan	11	12,6
5	Tahan	6	6,9
6	Sangat Tahan	4	4,6

Tabel 4.2 Sebaran desa di Kecamatan dengan rumah tangga tanpa akses air bersih berdasarkan prioritas 1-3 (rentan pangan)

No.	Kecamatan	Prioritas			Total Desa
		1	2	3	
1	SEKADAU HILIR	2	2	5	9
2	SEKADAU HULU	5	3	2	10
3	NANGA TAMAN	4	1	4	9
4	NANGA MAHAP	11	0	1	12
5	BELITANG HILIR	1	3	4	8
6	BELITANG	0	3	3	6
7	BELITANG HULU	6	4	2	12

Dari data tersebut di atas dapat dilihat bahwa desa tanpa akses air bersih yang memadai paling banyak atau masuk dalam kondisi rentan rawan pangan (prioritas 1-3) yaitu paling banyak di Kecamatan Nanga Mahap dan Belitang Hulu sebanyak 12 Desa, disusul Kecamatan Sekadau Hulu sebanyak 10 Desa, Sekadau Hilir dan Nanga Taman masing-masing sebanyak 9 Desa, Belitang Hilir sebanyak 8 Desa dan terakhir Kecamatan Belitang sebanyak 6 Desa.

4.2 RASIO TENAGA KESEHATAN

Rasio jumlah penduduk desa per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk adalah jumlah penduduk desa per tenaga kesehatan yang terdiri dari : (1) tenaga medis (dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, dokter sub spesialis, dokter gigi spesialis dan sub spesialis); (2) tenaga keperawatan (perawat non ners, perawat ners, perawat kesehatan anak, perawat maternitas, perawat medical bedah, perawat geriatri, perawat kesehatan jiwa, perawat komunitas, perawat lainnya, asisten tenaga kesehatan perawat); (3) tenaga kebidanan (bidan klinis, bidan desa, bidan pendidik, bidan lainnya, asisten tenaga kesehatan-bidan); dan (4) tenaga gizi (nutrisionist, dietisien, tenaga sisten tenaga kesehatan-gizi) dibandingkan dengan kepadatan penduduk. Tenaga kesehatan berperan penting dalam menurunkan angka kesakitan penduduk (morbiditas) dan meningkatkan pengetahuan masyarakat akan pentingnya makanan yang beragam bergizi seimbang dan aman.

Rasio jumlah penduduk desa per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk menunjukkan kemampuan jumlah tenaga kesehatan yang ada di

wilayah desa untuk melayani masyarakat. Jumlah tenaga kesehatan yang memadai akan meningkatkan status pemanfaatan pangan masyarakat.

Tabel 4.3 Sebaran rasio jumlah penduduk desa per tenaga kesehatan di desa berdasarkan skala prioritas

Prioritas	Kategori	Jumlah Desa	Persentase
1	Sangat Rentan	11	12,6
2	Rentan	17	19,5
3	Agak Rentan	13	14,9
4	Agak Tahan	20	23
5	Tahan	12	13,8
6	Sangat Tahan	14	16,1

Tabel 4.2 Sebaran Desa di Kecamatan dengan jumlah penduduk desa per tenaga kesehatan berdasarkan prioritas 1-3 (rentan pangan)

No.	Kecamatan	Prioritas			Total Desa
		1	2	3	
1	SEKADAU HILIR	0	1	3	4
2	SEKADAU HULU	1	3	3	7
3	NANGA TAMAN	5	2	1	8
4	NANGA MAHAP	3	5	4	12
5	BELITANG HILIR	1	3	1	5
6	BELITANG	0	0	0	0
7	BELITANG HULU	1	3	1	5

Dari data tersebut di atas dapat dilihat bahwa rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan yang paling banyak atau masuk dalam kondisi rentan rawan pangan (prioritas 1-3) Desa yang paling banyak terdapat di Kecamatan Nanga Mahap 12 Desa, disusul Kecamatan Nanga Taman sebanyak 8 Desa, Sekadau Hulu sebanyak 7 Desa, Belitang Hilir dan Belitang Hulu masing-masing sebanyak 5 Desa, dan terakhir Kecamatan Sekadau Hilir sebanyak 4 Desa, sementara Kecamatan Belitang tidak terdapat Desa yang masuk dalam kondisi rentan pangan dalam hal jumlah tenaga kesehatan per Desa.

4.3 DAMPAK (OUTCOME) DARI STATUS KESEHATAN

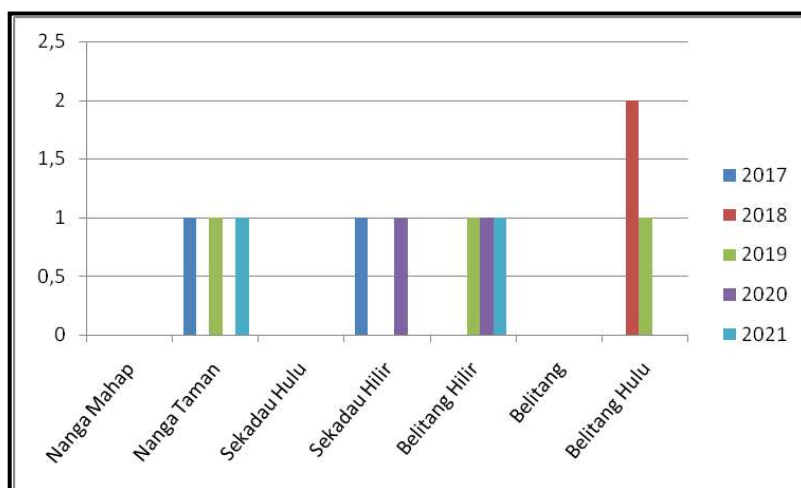
Ketahanan pangan merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi status kesehatan dan gizi masyarakat. Status gizi anak ditentukan oleh asupan makanan dan penyakit yang dideritanya. Status gizi anak balita diukur dengan 3 indikator yaitu:

1. Berat Badan Kurang dan Berat Badan Sangat Kurang yang biasa dikenal dengan *underweight* (berat badan berdasarkan umur (BB/U) dengan Zscore dari-2 dari median menurut referensi WHO 2005, yang mengacu kepada gabungan dari kurang gizi akut dan kronis);
2. Pendek atau *stunting* (tinggi badan berdasarkan umur (TB/U) dengan Zscore kurang dari-2 dari median menurut referensi WHO 2005, yang mengacu ke kurang gizi kronis jangka panjang); dan
3. Kurus atau *wasting* (berat badan berdasarkan tinggi badan (BB/TB) dengan Zscore kurang dari-2 dari median menurut referensi WHO 2005, yang mengacu kepada kurang gizi akut atau baru saja mengalami kekurangan gizi).

Jumlah penderita gizi buruk di Kabupaten Sekadau pada tahun 2017-2021 sebanyak 11 balita. Jumlah penderita gizi buruk yang tinggi ditemukan di Kecamatan Belitang Hilir (3 balita), Belitang Hulu (3 balita), Nanga Taman (3 balita), selanjutnya di Kecamatan Sekadau Hilir (2 balita). Dan terbaik tidak ditemukan balita gizi buruk di Kecamatan Sekadau Hulu, Nanga Mahap dan belitang (0 balita) artinya dalam kurun waktu 5 tahun terakhir tidak ada kasus balita gizi buruk di 3 Kecamatan tersebut.

Tabel 4.3 Penderita Gizi Buruk Periode 2017-2021

No.	Kecamatan	Penderita Gizi Buruk				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Nanga Mahap	-	-	-	-	-
2	Nanga Taman	1	-	1	-	1
3	Sekadau Hulu	-	-	-	-	-
4	Sekadau Hilir	1	-	-	1	-
5	Belitang Hilir	-	-	1	1	1
6	Belitang	-	-	-	-	-
7	Belitang Hulu	-	2	1	-	-
	Total	2	2	3	2	2

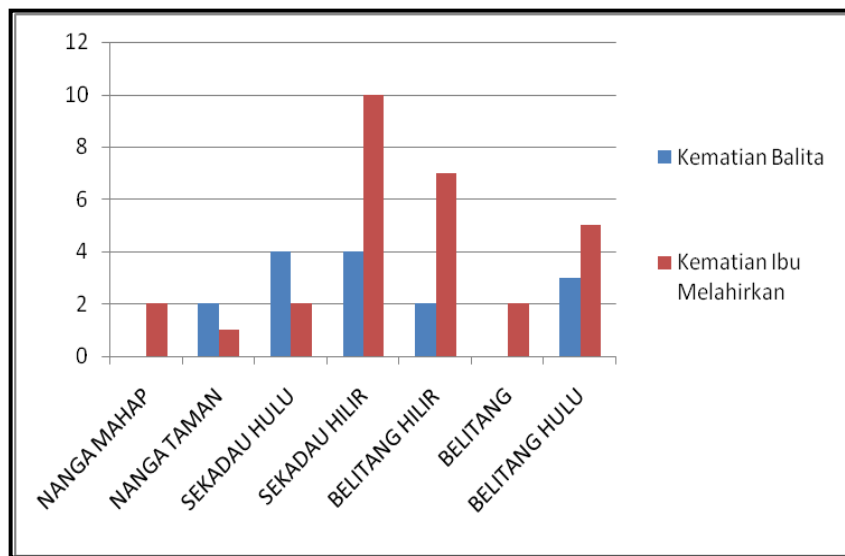


Gambar 4.1 Sebaran Jumlah Balita Penderita Gizi Buruk Periode 2017-2021

Angka kematian balita dan ibu saat melahirkan merupakan dampak dari status kesehatan dan gizi. Angka kematian balita pada tahun 2014-2020 di Kabupaten Sekadau adalah 15 jiwa, sementara angka kematian ibu saat melahirkan di Kabupaten Sekadau 29 jiwa. Angka kematian balita tertinggi terdapat di Kecamatan Sekadau Hilir dan Sekadau Hulu (masing-masing 4 jiwa) dan terendah terdapat di Kecamatan Nanga Mahap dan Belitang (0 jiwa). Angka kematian ibu saat melahirkan tertinggi di Kecamatan Sekadau Hilir (10 jiwa) dan terendah di Kecamatan Sekadau hulu dan Nanga Taman (1 jiwa). Untuk lebih lengkap dapat dilihat pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4 Jumlah Kematian Balita dan Ibu Saat Melahirkan per Kecamatan Periode 2014-2020

No.	Kecamatan	Jumlah Kematian Balita	Jumlah Kematian Ibu Saat Melahirkan	Total
1	Nanga Mahap	0	2	2
2	Nanga Taman	2	1	3
3	Sekadau Hulu	4	2	6
4	Sekadau Hilir	4	10	14
6	Belitang Hilir	2	7	9
7	Belitang	0	2	2
8	Belitang Hulu	3	5	8
	Total	15	29	44



Gambar 4.2 Grafik Jumlah Kematian Balita dan Ibu Saat Melahirkan per Kecamatan Periode 2014-2020

4.4. STRATEGI PENINGKATAN PEMANFAATAN PANGAN

Masalah gizi kronis (stunting) masih tetap tinggi di Kabupaten Sekadau, masalah gizi kronis merupakan akibat kurang optimalnya pertumbuhan janin dan bayi di usia dua tahun pertama kehidupannya, terutama gabungan dari kurangnya asupan gizi, paparan terhadap penyakit yang tinggi serta pola pengasuhan yang kurang tepat. Semua faktor ini dapat menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki, yang akhirnya dapat menyebabkan meningkatnya beban penyakit dan kematian pada balita.

Kurang gizi pada usia dini, terutama stunting dapat menghambat perkembangan fisik dan mental yang akhirnya mempengaruhi prestasi dan tingkat kehadiran di sekolah. Anak yang kurang gizi lebih cenderung untuk masuk sekolah lebih lambat dan lebih cepat putus sekolah. Dampak ke masa depannya adalah mempengaruhi potensi kemampuan mencari nafkah, sehingga sulit keluar dari lingkaran kemiskinan. Anak yang menderita kurang berat badan menurut umur (kurang gizi) dan secara cepat berat badannya meningkat, maka pada saat dewasa cenderung untuk menderita penyakit kronik yang terkait gizi (kencing manis, tekanan darah tinggi dan penyakit jantung koroner). Dampak jangka panjang, oleh kurang gizi pada masa anak-anak juga menyebabkan rendahnya tinggi badan dan pada ibu-ibu dapat melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR), yang akhirnya menyebabkan terulangnya lingkaran masalah ini pada generasi selanjutnya.

Untuk menurunkan prevalensi stunting, maka intervensi gizi harus segera direncanakan dan dilakukan secara efektif pada semua tingkatan, mulai dari rumah tangga sampai tingkat nasional. Untuk mencegah dan mengatasi masalah kekurangan gizi secara efektif, perlu prioritas untuk kelompok rentan gizi, memahami penyebab kurang gizi adalah multidimensi, intervensi yang tepat dan efektif untuk mengatasi penyebabnya, dan meningkatkan komitmen serta investasi dalam bidang gizi.

Berikut ini adalah strategi untuk mengatasi masalah kesehatan serta akses air bersih secara umum yang tertuang dalam dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sekadau :

1. Meningkatkan kualitas kesehatan ibu
2. Meningkatkan kualitas kesehatan bayi
3. Meningkatkan kualitas kesehatan balita
4. Menurunkan prevalensi stunting
5. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat
6. Menurunkan kesakitan penyakit menular dan penyakit tidak menular
7. Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap bahaya covid – 19
8. Meningkatkan kualitas penanganan new emergin disease/pandemi
9. Meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi
10. Meningkatkan kesadaran kesehatan reproduksi keluarga
11. Penguatan sistem kesehatan dan peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat
12. Optimalisasi pengelolaan dan pengembangan SPAM
13. Peningkatan pemanfaatan air bersih

BAB V

KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN KOMPOSIT

Sebagaimana disebutkan di dalam Bab 1, bahwa kondisi kerentanan terhadap kerawanan pangan kronis secara komposit ditentukan berdasarkan 6 indikator yang berhubungan dengan ketersediaan pangan, akses pangan dan penghidupan, serta pemanfaatan pangan dan gizi, yang dijelaskan secara rinci pada Bab Dua, Tiga dan Empat. Peta kerentanan terhadap kerawanan pangan komposit (Peta 6.1) ditetapkan melalui Analisis Pembobotan.

5.1. KONDISI KETAHANAN PANGAN

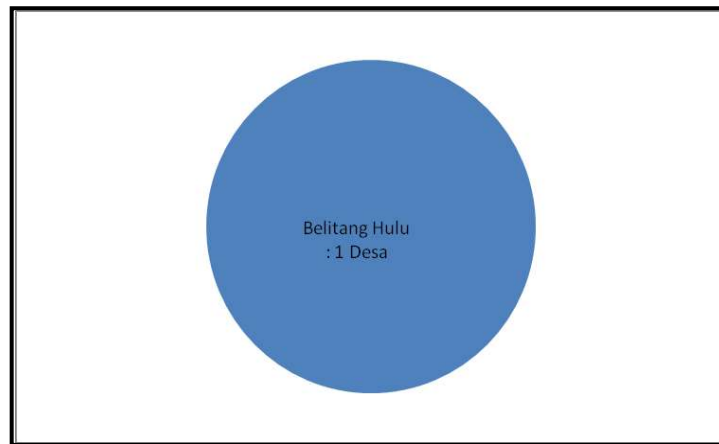
Peta komposit menjelaskan kondisi kerentanan terhadap kerawanan pangan suatu wilayah (kecamatan) yang disebabkan oleh kombinasi dari berbagai dimensi kerawanan pangan. Berdasarkan hasil pembobotan, desa-desa dikelompokkan ke dalam 6 prioritas. Prioritas 1 merupakan prioritas utama yang menggambarkan tingkat kerentanan yang paling tinggi, sedangkan prioritas 6 merupakan prioritas yang relatif lebih tahan pangan. Dengan kata lain, wilayah (desa) prioritas 1 memiliki tingkat resiko kerentanan terhadap kerawanan pangan yang lebih besar dibandingkan wilayah (desa) lainnya sehingga memerlukan perhatian segera. Meskipun demikian, wilayah (desa) yang berada pada prioritas 1 tidak berarti semua penduduknya berada dalam kondisi rawan pangan, juga sebaliknya wilayah (desa) pada prioritas 6 tidak berarti semua penduduknya tahan pangan.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dari 87 desa yang ada di Kabupaten Sekadau maka didapatkan 1 desa (Prioritas 1), 11 desa (Prioritas 2), 22 desa (Prioritas 3), 20 desa (Prioritas 4), 21 desa (Prioritas 5) dan 12 desa (Prioritas 6). Secara Total 34 Desa Masuk dalam prioritas 1-3 (rentan).

Tabel 5.1. Sebaran Jumlah Desa berdasarkan Prioritas

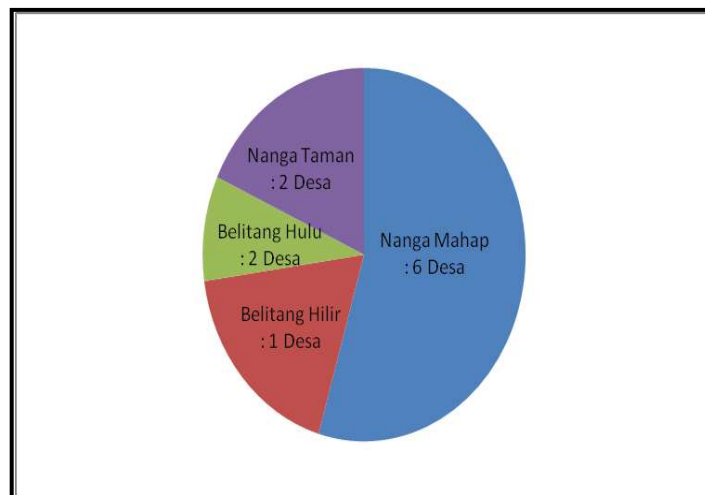
Prioritas	Jumlah Desa	Persentase
1	1	1,15%
2	11	12,64%
3	22	25,29%
4	20	22,99%
5	21	24,14%
6	12	13,79%

Desa rentan terhadap kerawanan pangan prioritas 1 (sangat rentan) terdapat di wilayah Kecamatan Belitang Hulu (1 desa). dapat dilihat pada Gambar 5.1.



Gambar 5.1 Sebaran Jumlah Desa Prioitas 1 Per Kecamatan

Desa rentan terhadap kerawanan pangan prioritas 2 (rentan) terdapat di wilayah Kecamatan Nanga Mahap (6 desa), Kecamatan Belitang Hulu (2 desa), Kecamatan Nanga Taman (2 desa), Kecamatan Belitang Hilir (1 Desa) dapat dilihat pada Gambar 5.2.



Gambar 5.2 Sebaran Jumlah Desa Prioitas 2 Per Kecamatan

Desa rentan terhadap kerawanan pangan prioritas 3 (cukup rentan) terdapat di wilayah Kecamatan Sekadau Hulu (6 desa), Kecamatan Nanga Taman (4 desa), Kecamatan Nanga Mahap (4 desa), Kecamatan Belintang Hulu (4 desa), Kecamatan Belintang Hilir (2 desa) dan Kecamatan Sekadau Hilir (2 Desa) dapat dilihat pada Gambar 5.3.



Gambar 5.3 Sebaran Jumlah Desa Priroitas 3 per Kecamatan

5.2. FAKTOR PENYEBAB KERENTANAN PANGAN

Desa rentan terhadap kerawanan pangan Prioritas 1, 2 dan 3 secara umum seperti pada data di atas disebabkan oleh faktor kerentanan pangan (bervariasi mulai dari sangat rentan, rentan dan agak rentan) yaitu : (1) rendahnya rasio luas baku lahan sawah terhadap jumlah penduduk (Ketersediaan Pangan), (2) rendahnya rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga, (3) tingginya rasio penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk dan Saran, (4) banyaknya jumlah Desa yang tidak memiliki akses penghubung yang memadai, (5) tingginya Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga, dan (6) tingginya Rasio jumlah penduduk desa per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk.

BAB 6

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Kerentanan terhadap kerawanan pangan pada suatu wilayah penyebabnya berbeda antara wilayah satu dengan wilayah lainnya, dengan demikian cara penanganan dan penyelesaiannya juga berbeda. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan ini membantu memahami keadaan diantara wilayah (desa), dan dengan demikian akan membantu para pengambil kebijakan untuk dapat menentukan langkah-langkah yang tepat dalam menangani isu-isu ketahanan pangan yang relevan di wilayahnya.

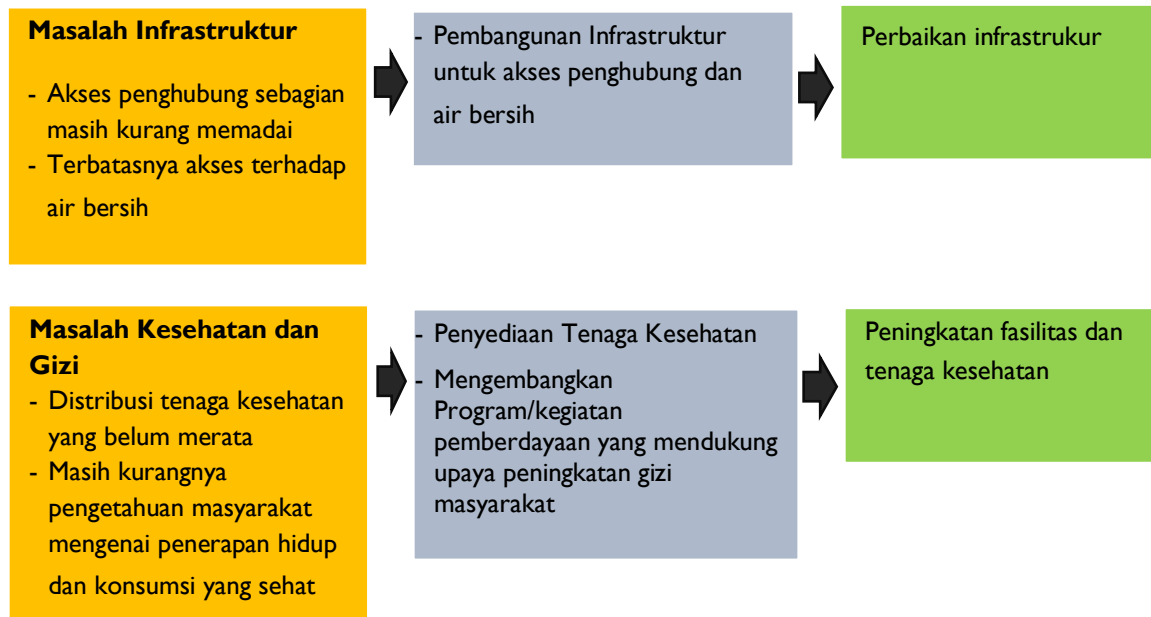
Fokus lokasi penanganan kerentanan pangan di wilayah desa diprioritaskan pada:

- a. Desa-desa prioritas 1-3 (rentan pangan) yang tersebar di Kecamatan Sekadau Hilir, Sekadau Hulu, Nanga Taman, Nanga Mahap, Belitang Hilir dan Belitang Hulu.
- b. Desa-desa yang lokasinya jauh dari ibu kota kabupaten atau di wilayah yang berbatasan dengan kabupaten lain
- c. Desa-desa pemekaran yang fasilitas, infrastruktur dan kapasitas SDM yang masih terbatas.

Upaya-upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan ditekankan pada penyebab utama kerentanan pangan di desa seperti digambarkan pada diagram di bawah ini.

Gambar 6.1 Kerangka Intervensi untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan





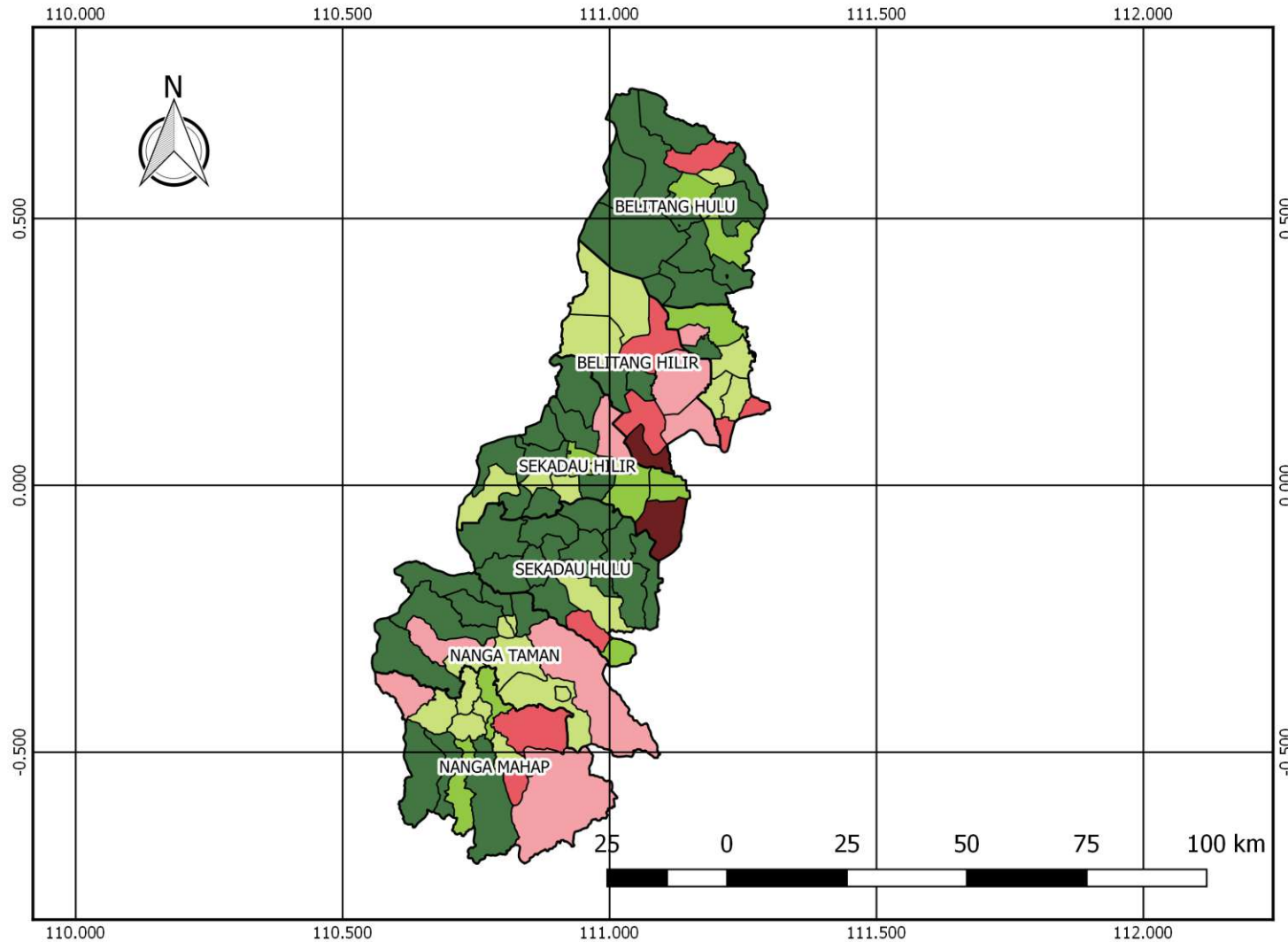
Program-program peningkatan ketahanan pangan dan penanganan kerentanan pangan wilayah kabupaten diarahkan pada kegiatan :

- a. Peningkatan penyediaan pangan di daerah non sentra produksi dengan mengoptimalkan sumberdaya pangan lokal.
- b. Pembukaan lahan pertanian potensial baru, serta pengembangan diversifikasi pangan pokok berbasis sumber daya pangan lokal
- c. Penanganan kemiskinan melalui penyediaan lapangan kerja, padat karya, redistribusi lahan; pembangunan infrastruktur dasar (jalan, air bersih), dan pemberian bantuan sosial; serta pembangunan usaha produktif/UMKM/padat karya untuk menggerakkan ekonomi wilayah.
- d. Peningkatan akses air bersih melalui penyediaan fasilitas dan layanan air bersih; sosialisasi dan penyuluhan.
- e. Penyediaan tenaga kesehatan.

LAMPIRAN



PETA RASIO LUAS LAHAN PERTANIAN TERHADAP JUMAH PENDUDUK KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2022



Legenda

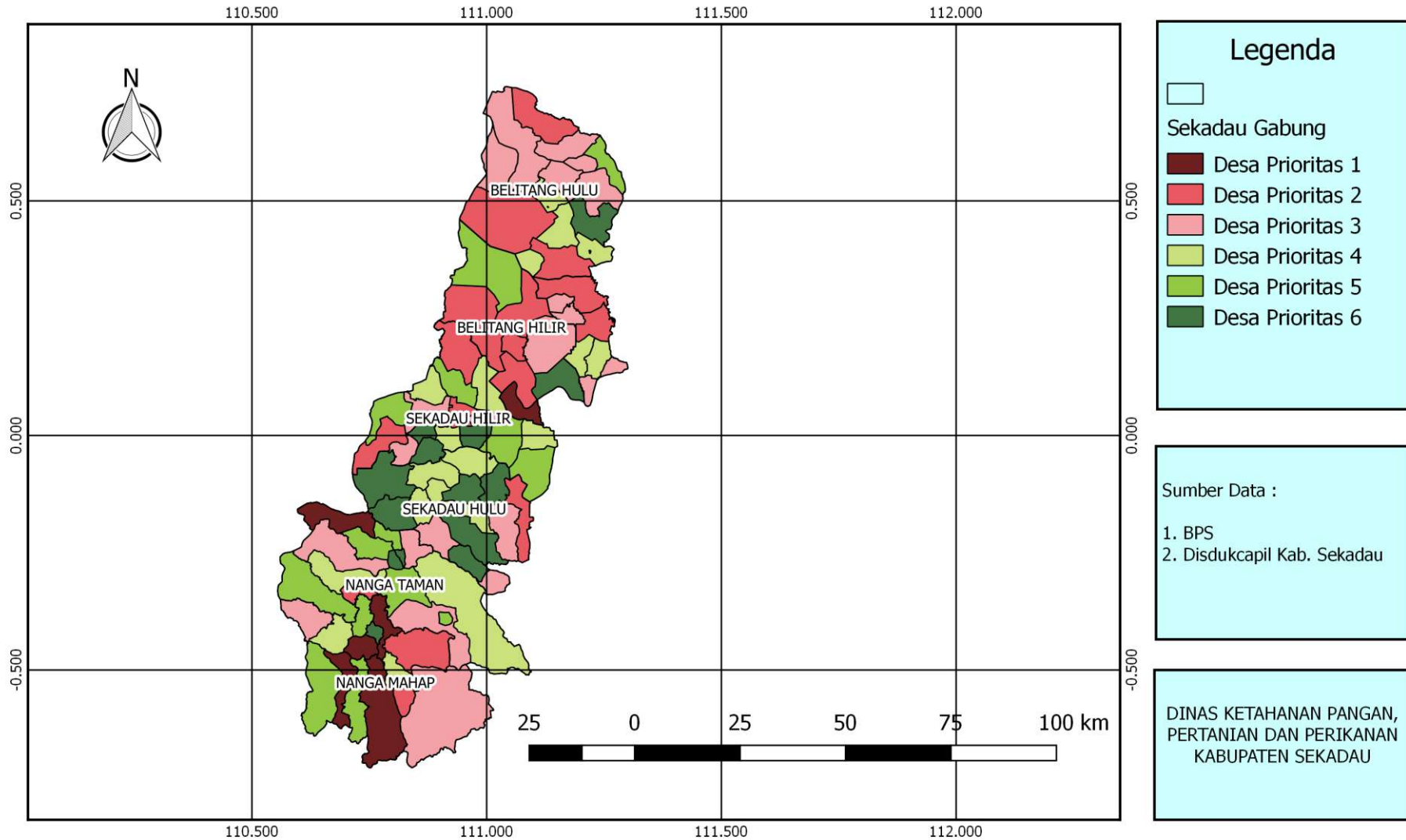
Sekadau Gabung

- Desa Prioritas 1
- Desa Prioritas 2
- Desa Prioritas 3
- Desa Prioritas 4
- Desa Prioritas 5
- Desa Prioritas 6

Sumber Data :
1. BPS
2. DKP3 Kab. Sekadau

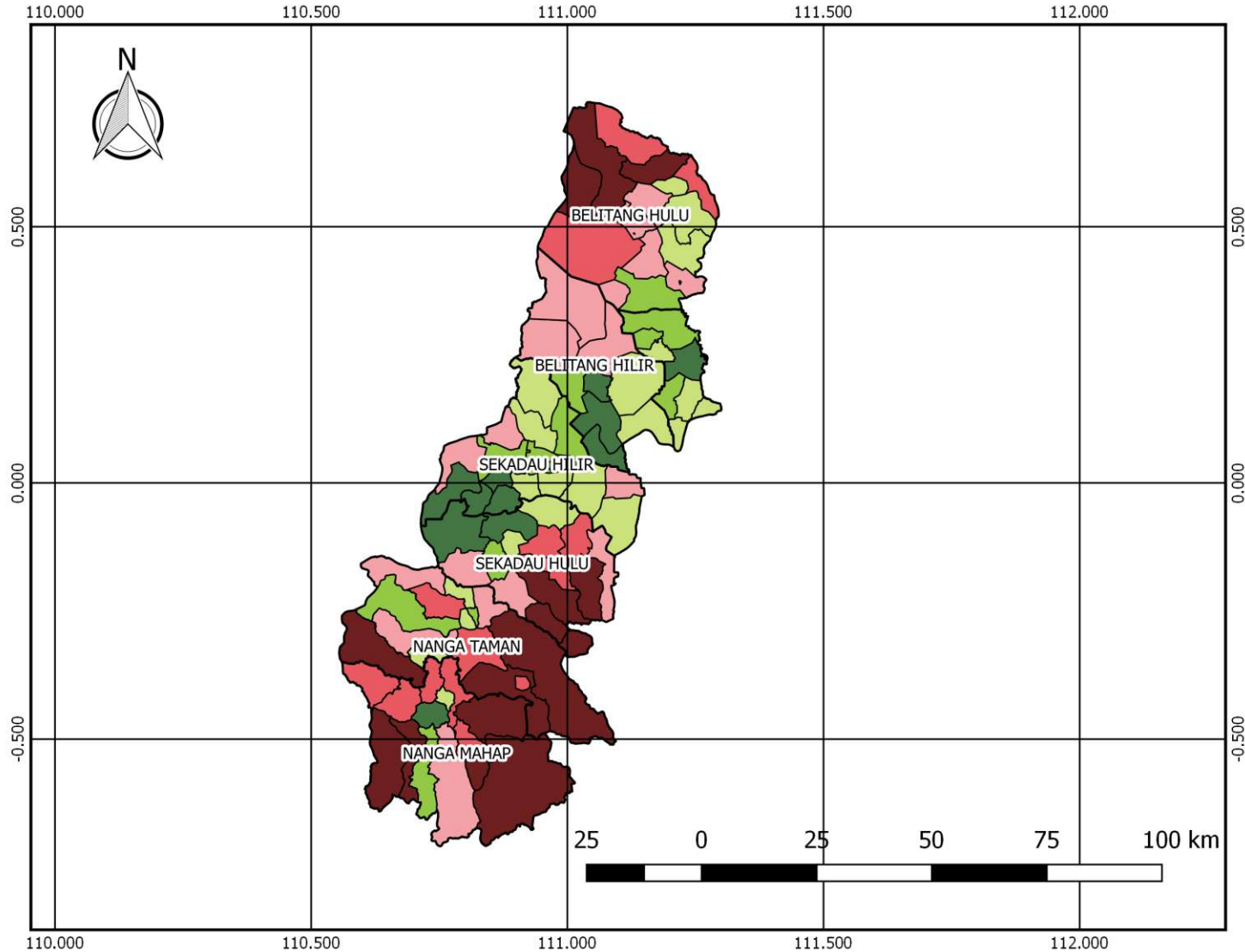
DINAS KETAHANAN
PANGAN, PERTANIAN
DAN PERIKANAN
KABUPATEN SEKADAU

PETA RASIO JUMLAH SARANA DAN PRASARANA PENYEDIA PANGAN TERHADAP JUMLAH RUMAH TANGGA KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2022





PETA RASIO JUMLAH PENDUDUK TINGKAT KESEJAHTERAAN TERENDAH TERHADAP JUMLAH PENDUDUK DESA KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2022



Legenda

Sekadau Gabung

- Desa Prioritas 1
- Desa Prioritas 2
- Desa Prioritas 3
- Desa Prioritas 4
- Desa Prioritas 5
- Desa Prioritas 6

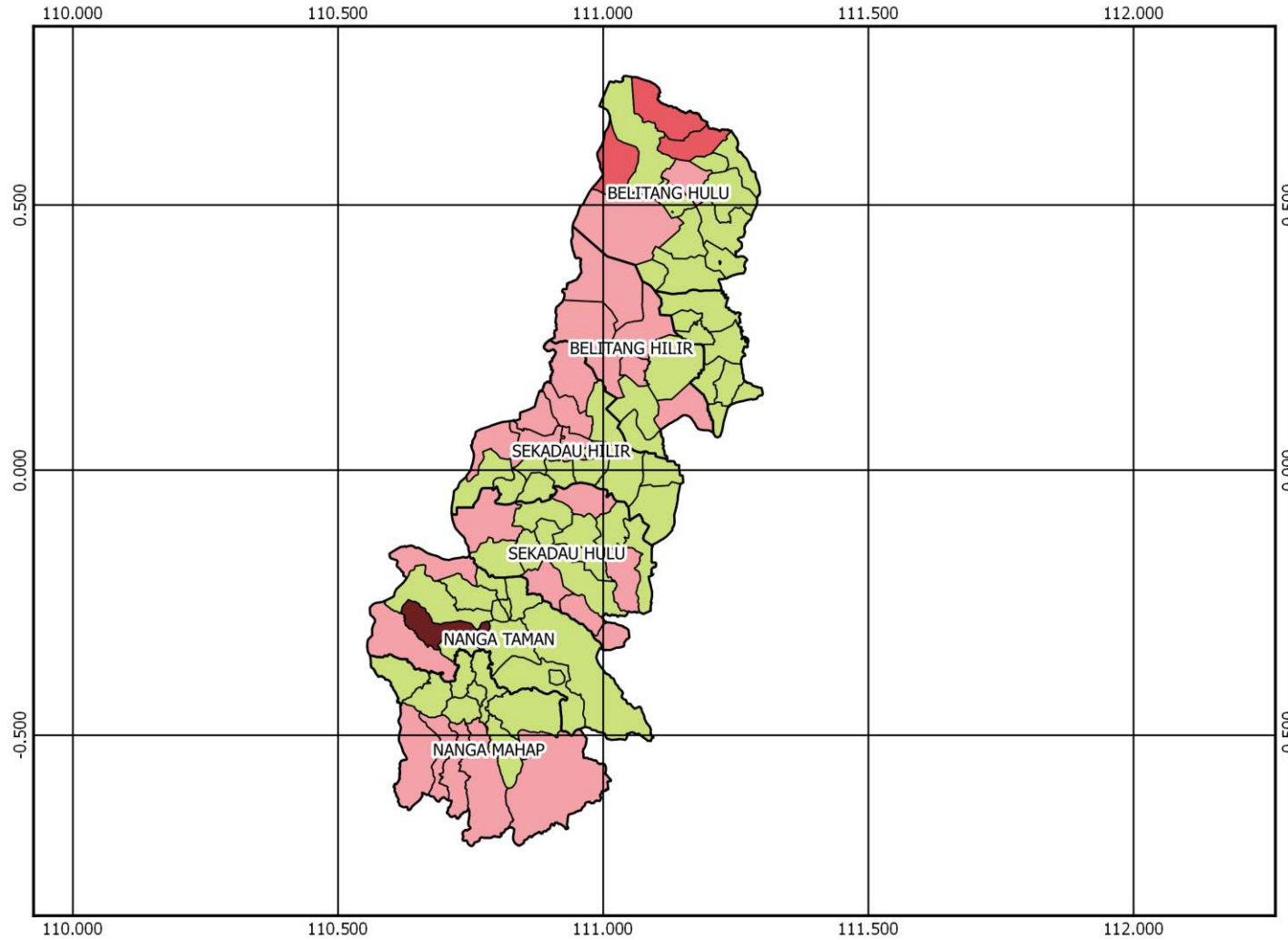
Sumber Data :

- BPS
- Kementerian Sosial

DINAS KETAHANAN PANGAN,
PERTANIAN
DAN PERIKANAN
KABUPATEN SEKADAU



PETA DESA YANG TIDAK MEMILIKI AKSES PENGHUBUNG MEMADAI KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2022



Legenda

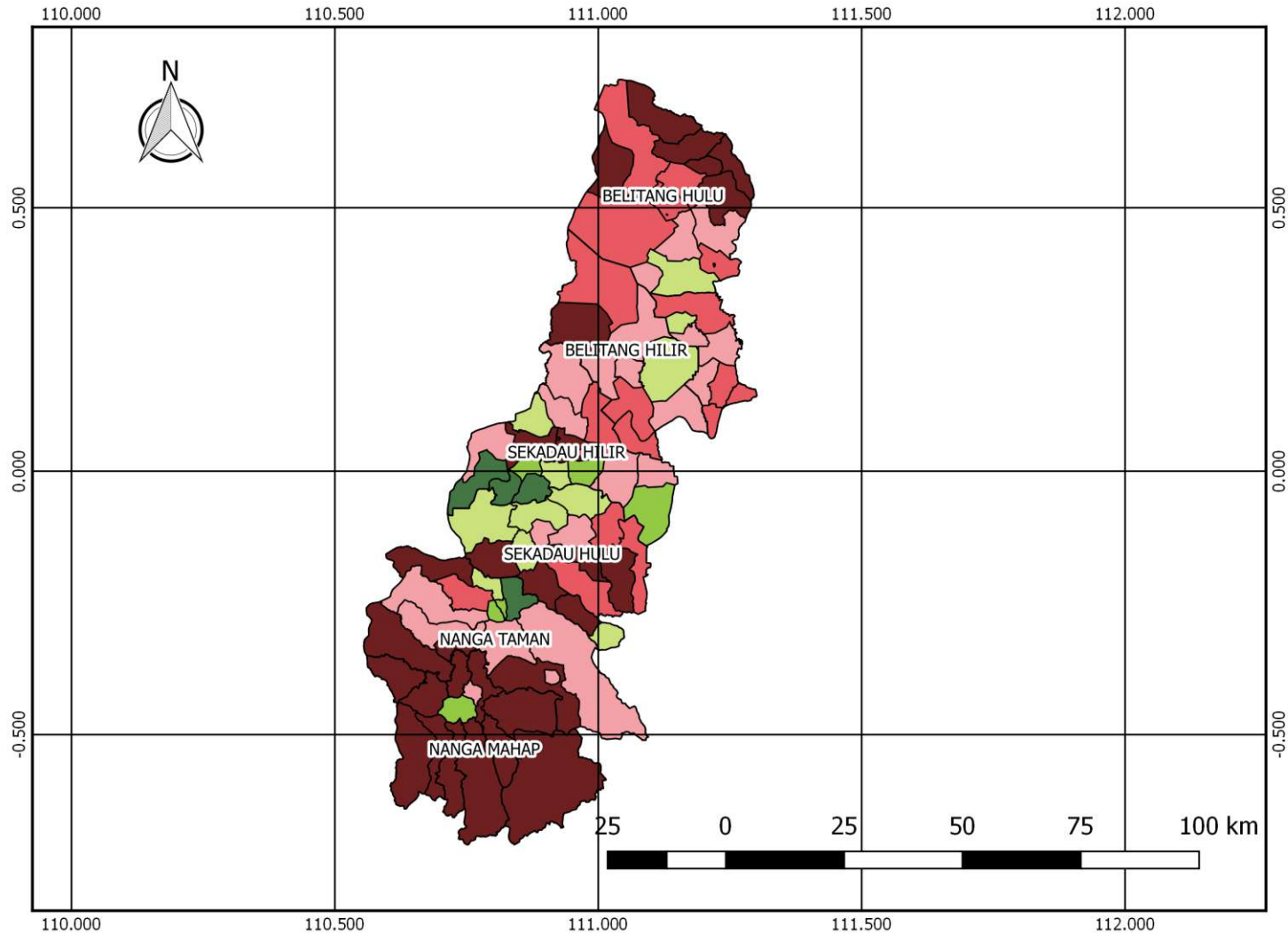
☐ Sekadau Gabung

- Desa Prioritas 1
- Desa Prioritas 2
- Desa Prioritas 3
- Desa Prioritas 4
- Desa Prioritas 5
- Desa Prioritas 6

Sumber Data :
1. BPS

DINAS KETAHANAN
PANGAN, PERTANIAN
DAN PERIKANAN
KABUPATEN SEKADAU

PETA RASIO JUMLAH RUMAH TANGGA TANPA AKSES AIR BERSIH TERHADAP JUMLAH RUMAH TANGGA KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2022



Sumber Data :

1. Kementerian Sosial
2. Disdukcapil Kab. Sekadau

DINAS KETAHANAN PANGAN,
PERTANIAN
DAN PERIKANAN
KABUPATEN SEKADAU

PETA RASIO JUMLAH PENDUDUK PER TENAGA KESEHATAN TERHADAP KEPADATAN PENDUDUK KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2022

